

**HEGEMONI WACANA DALAM KONTESTASI PEMILIHAN
PRESIDEN TAHUN 2019 PERSPEKTIF TEORI HEGEMONI
ANTONIO GRAMSCI**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

MOHAMMAD JUFRI

NIM : E91215033

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Mohammad Jufri

NIM : E91215033

Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini dinyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Hegemoni Wacana dalam Kontestasi Pemilihan Presiden Tahun 2019 Perspektif Teori Hegemoni Antonio Gramsci**" secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan hasil plagiat kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 13 Januari 2020

Yang menyatakan,



MOHAMMAD JUFRI

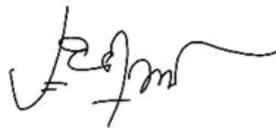
E91215033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Hegemoni Wacana dalam Kontestasi Pemilihan Presiden Tahun 2019: Perspektif Teori Hegemoni Antonio Gramsci” yang ditulis oleh Mohammad Jufri ini telah disetujui pada tanggal 13 Januari 2020

Surabaya, 13 Januari 2020

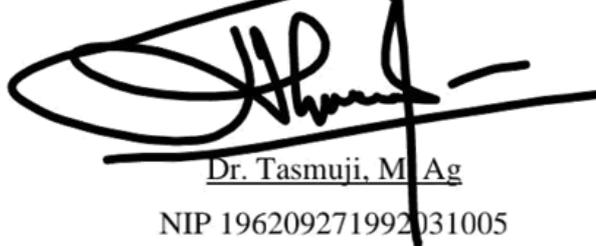
Pembimbing 1



Drs. Loekisno Choiril Warsito, M.Ag

NIP 196303271993031004

Pembimbing 2



Dr. Tasmuji, M. Ag

NIP 196209271992031005

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Hegemoni Wacana dalam Kontestasi Pemilihan Presiden Tahun 2019 Perspektif Teori Hegemoni Antonio Gramsci”. Yang ditulis oleh Mohammad Jufri ini telah di uji di depan Tim Penguji pada tanggal 13 Januari 2020

Mengesahkan,

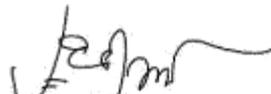
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



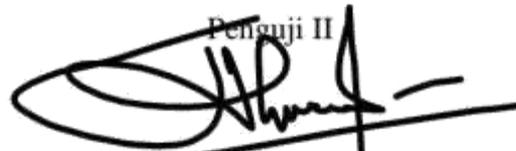
Dr. H. Kunawati Basri, M.Ag
NIP 196409181992031002

Penguji I



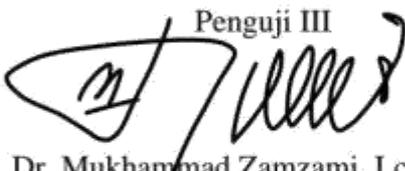
Dr. Loekisno Choiril Warsito, M.Ag
NIP 196303271993031004

Penguji II



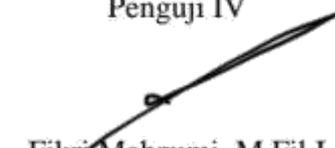
Dr. Tasmuji, M.Ag
NIP 196209271992031005

Penguji III



Dr. Mukhammad Zamzami, Lc, M.Fil.I
NIP 198109152009011011

Penguji IV



Fikri Mahzumi, M.Fil.I
NIP 198204152015031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Jufri
NIM : E91215033
Fakultas/Jurusan : Aqidah Filsafat Islam
E-mail address : jufri.husni@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (... ..)

yang berjudul :

HEGEMONI WACANA DALAM KONTESTASI PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019
PERSPEKTIF TEORI HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI

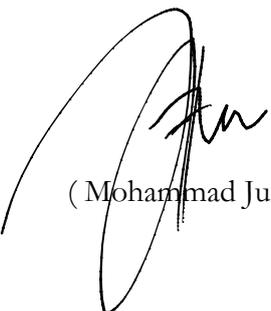
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2020

Penulis


(Mohammad Jufri)

ABSTRAK

Mohammad Jufri “Hegemoni Wacana dalam Kontestasi Pemilihan Presiden Tahun 2019 Perspektif Teori Hegemoni Antonio Gramsci”

Skripsi ini meneliti gerakan aksi *people power* yang terjadi dalam Kontestasi Pemilihan Presiden dengan menggunakan pendekatan hegemoni Antonio Gramsci. Adanya mobilisasi massa untuk bersama-sama menuntut KPU agar diadakan pemilu ulang atau mendiskualifikasikan pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf dan mengangkat pasangan Prabowo-Sandi sebagai presiden yang sah membuah suhu perpolitikan Indonesia semakin panas kian menegangkan. Mereka juga menggiring masyarakat untuk tidak percaya atas pemilu yang dianggap penuh dengan kecurangan. Berbagai isu negative mereka lontarkan demi menarik massa, mulai dari isu 31 juta daftar pemilih tetap dan polemik kotak suara berbahan kardus. Kubu dari pasangan calon Prabowo sandi menganggap kejadian itu dilakukan dengan kesengajaan. Hal ini mereka jadikan sebagai propaganda untuk menguasai opini publik. Disini dapat penulis simpulkan bahwa sikap dan tuduhan yang dilontarkan kubu Prabowo sandi terlalu berlebihan dan memiliki makna terselubung dibalik sikap yang mereka tunjukkan. Dalam hal ini, menurut teori hegemoni Gramsci dapat dikatakan dalam proses membentuk suatu kesadaran dan persetujuan spontan dari masyarakat yang mana tujuannya untuk menarik massa untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Tujuan skripsi ini ingin menjawab sebuah pertanyaan bagaimana pola hegemoni wacana dalam kontestasi pemilihan presiden 2019 dalam perspektif Antonio Gramsci. Skripsi ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan logika berfikir induktif. Dalam perspektif ini, penulis memeriksa politik yang dilakukan kubu Prabowo-Sandi yang berhasil menggunakan hegemoni secara total. Konsep inilah yang mendukung terjadinya propaganda antar partai politik. Hasil analisis riset penelitian ini menegaskan bahwa terjadi ketegangan antara dua kubu yang bersaing dipilpres 2019 dan terjadi perpecahan dalam formasi masyarakat Indonesia.

Kata kunci: people power, hegemoni, Gramsci

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Kerangka Teoritis.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II: BIOGRAFI DAN HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI	
A. Biografi Antonio Gramsci.....	17
B. Hegemoni.....	18
C. Hegemoni Gramsci	22
D. Konsensus.....	27
E. Intelektual Sebagai Organiser Hegemoni.....	30

F. Pertarungan Posisi.....	33
----------------------------	----

BAB III: KRONOLOGI SENGKETA WACANA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2019

A. Polemik Wacana Pra Pemilu.....	36
1. 31 Juta Daftar Pemilih Tetap (DPT).....	36
2. Kotak Suara Berbahan Kardus.....	38
3. Surat Suara Tujuh Kontainer Tercoblos.....	42
4. Wacana <i>People Power</i>	43
B. Polemik Wacana Pasca Pemilu.....	46
1. Demo di Depan Kantor Bawaslu.....	47
2. Demo di Depan KPU oleh Mahasiswa dan Pemuda.....	49
3. Demonstrasi 22 Mei 2019 (<i>people power</i>)	51

BAB IV: GERAKAN *PEOPLE POWER* PERSPEKTIF HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI

A. Pola Hegemoni Kultural Gramsci dalam Sengketa Pemilu.....	55
B. Jenis Hegemoni pada Gerakan <i>People Power</i> dalam Pilpres 2019.....	63

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu Presiden pada tanggal 17 April 2019 lalu sudah terlaksana dengan lancar meskipun masih terjadi sedikit kegaduhan di sebagian daerah-daerah tertentu, akan tetapi secara nasional tidak mengganggu kondusivitas dari pelaksanaan pesta lima tahunan tersebut. Sekalipun pemilu sudah terlaksana, namun suhu politik pada saat ini belum juga mereda. Salah satu penyebabnya dikarenakan salah satu pasangan calon presiden tidak menerima hasil quick count lembaga-lembaga survei Independen seperti Poltracking, Lembaga Survei Indonesia, Charta Politika, Litbang Kompas, Indobarometer, dan Kedai Kopi yang kesemuanya merilis hasil *quick count* dengan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin lebih unggul dari pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Hal ini tentu dapat menguntungkan kubu 01. Sebaliknya, bagi kubu 02 ini dapat merugikan kelompoknya. Disini kemudian kubu 02 tidak menerima hasil *quick count* tersebut dan menuding lembaga survei diatas sudah tidak netral lagi.¹

Selain itu, pasca pemilu, media sosial dihebohkan oleh banyaknya informasi-informasi kecurangan yang bertebaran baik di *facebook*, *whatsapp*, *youtube*, maupun media lainnya baik kecurangan yang dilakukan kubu 01 maupun 02. Dari sini bertebaran pula komentar maupun argumen dari para

¹ Prabowo Sebut Quick Count Bohong Lembaga Survey Angkat Bicara dalam [https://www. Nasional.tempo.co/amp/1197486/](https://www.Nasional.tempo.co/amp/1197486/) Diakses 17 Mei 2019.

pendukung masing-masing di berbagai media sosial yang kian hari semakin menegangkan dan menjurus kepada perpecahan. Saling klaim kebenaran serta tuduhan kecurangan antar pendukung tidak bisa dihindari hingga media sosial sesak dengan kegaduhan yang dibuat oleh para pendukung fanatik dari kedua pasangan calon tersebut yang lagi bersengketa. Pihak pendukung Prabowo-Sandi sebagai pihak yang kalah versi hitung cepat dan quick count Lembaga survey menuding curang kepada pihak pendukung Jokowi-Amin, sedangkan pihak pendukung Jokowi-Amin tidak memilih diam dengan memberikan argumen pembelaan terhadap setiap tuduhan yang dialamatkan.

Dari informasi kecurangan yang bertebaran di media sosial serta tuntutan yang kian hari semakin besar dan masif di media massa, pertarungan wacana antara elite dan juga masyarakat menggaung di berbagai tempat, televisi, rumah, sekolah, perguruan tinggi, sampai ke anak-anak usia muda. Sebagai pihak yang kalah versi hitungan cepat membuat para pendukung pasangan calon Prabowo-Sandi tidak menemukan kepuasan terhadap penyelenggaraan pemilu tersebut. Dan untuk mengekspresikan ketidakpuasan tersebut muncullah gerakan gerakan aksi protes di berbagai daerah yang dilakukan oleh pendukung fanatik pasangan calon Prabowo-Sandi. Mereka menuntut KPU selaku penyelenggara pemilu untuk berlaku jujur dan adil dan menyerukan pemilu ulang serta mendengungkan untuk mendiskualifikasikan pasangan calon nomer urut 01 Jokowi-Amin karena telah berbuat curang secara terorganisir, struktur dan massif (TSM) dan mengangkat Prabowo-Sandi sebagai presiden yang sah.

Selain itu, tim sukses dari pasangan Prabowo-Sandi yaitu Badan Pemenangan Nasional (BPN) dalam merespon temuan kecurangan tersebut melalui Dewan Pembina BPN Amien Rais mengambil sikap dengan mendengungkan wacana gerakan *people power*.² Dimana gerakan ini menyimpan makna sejarah kelam masa lalu dalam benak masyarakat Indonesia, yang mana gerakan ini yang menumbangkan orde baru dan melengserkan Presiden Republik Indonesia yang ke 2 yakni Bapak Soeharto. Tentu sejarah kelam masa lalu yang membuat rakyat mengalami trauma dengan banyaknya pertumpahan darah yang terjadi kala itu agar tidak terulang kembali di masa kini.

Tidak lama dengan dilontarkannya wacana tersebut oleh Amien Rais langsung menjadi sorotan publik dan mendapatkan tanggapan penolakan dari sejumlah organisasi keagamaan, tokoh masyarakat maupun masyarakat di berbagai daerah. Tercatat yang resmi menyatakan penolakan terhadap gerakan *people power* ala BPN ialah Majelis Ulama Indonesia, PB NU, dan lain sebagainya. Adapun daerah yang tercatat menolak *people power* yang dirangkum dalam berita detik.com antara lain, Jawa barat oleh MUI Jawa Barat, Sulawesi Selatan oleh deklarasi sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Maros, Banyuwangi yang diprakarsai oleh Forum Kerukunan Umat Beragama, Bogor yang diprakarsai oleh PCNU Kabupaten Bogor, dan lain

² Gerakan *People Power* Siasat Terakhir Prabowo Jelang 22 Mei dalam <http://katadata.co.id/berita/2019/05/13/> Diakses 17 Mei 2019.

lain meliputi Semarang, NTB, Banjarmasin, Bangkalan, Banten, dan Sebagainya.³

Sekalipun mendapat penolakan dari berbagai elemen lapisan masyarakat dan berbagai institusi lembaga pemerintahan namun gerakan aksi *people power* terlaksana juga pada tanggal 22 Mei 2019 yang bertepatan dengan pengumuman pemenang hasil pemilu yang dilakukan oleh KPU. Menurut laporan Detik.com, massa aksi pada saat itu bergerak mulai melakukan aksinya di depan kantor Bawaslu sejak Selasa sore dan bertahan sampai dini hari hingga polisi turun membubarkan mereka. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu massa aksi bergerak ke Gedung KPU dengan membawa tuntutan menolak hasil pilpres dan meminta untuk mendiskualifikasi calon presiden Jokowi-Amin, karena telah melakukan kecurangan dalam pemilu yang terorganisir, struktur dan massif.

Di sisi lain, rupanya gerakan aksi 22 Mei yang disebut *people power* tidak terlepas dari kerusuhan yang dilakukan oleh sebagian massa aksi yang tersulut emosi. Berita yang dimuat detik.com dalam kerusuhan data yang masuk terdapat 7 orang meninggal dunia dan 200-an orang mengalami luka-luka sedangkan menurut Anies Baswedan orang telah meninggal dunia sudah mencapai 8 orang.⁴ Dalam berita yang dihimpun oleh liputan6, disebutkan bahwa polisi telah menangkap sejumlah orang provokator pada aksi tersebut dan tersangka-tersangka lain yang memiliki peran berbeda yang tampaknya

³ Ramai-Ramai Kompak Tolak People Power di Penjuru Negeri dalam <https://m.detik.com/news/be-rita/d-4551419/> Diakses 17 Mei 2019.

⁴ 6 Tewas di Rusuh Jakarta 22 Mei Dini Hari Tadi 200-an Orang Luka-Luka dalam <https://news.det-ik.com/berita/d-4559846/> Diakses pada tanggal 27 Mei 2019.

terjadinya kerusuhan tersebut memang direncanakan sebelumnya. Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian dari penangkapan itu, polisi menemukan amplop berisi uang totalnya lebih kurang Rp 6 juta, dan para pelaku mengakui ada pihak yang membayarnya untuk melakukan kerusuhan.⁵

Terlepas dari kejadian tersebut, dalam skala global, istilah *people power* sudah beberapa kali disebut dalam sejarah di berbagai negara. Di antaranya adalah Gerakan Mahasiswa (1968/1972) di Eropa, Gerakan Anti Rezim Militer 1973 di Thailand, dan hingga runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989. Di Indonesia gerakan *people power* juga pernah terjadi ketika gerakan mahasiswa 1998 melengserkan Presiden Soeharto, dan gerakan *people power* pendukung Jokowi di pemilu 2014 yang sudah menjadi buku yang berjudul *Jokowi People Power*. Pemilu 17 April 2019 wacana *people power* kembali didengungkan.

Gerakan *people power* dalam pilpres tahun ini menurut penulis sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dimana gerakan inilah yang dianggap sebagai titik puncak dari panasnya sengketa wacana yang terjadi dalam kontestasi pilpres 2019. Gerakan *people power* atau semacamnya tentu memiliki latar belakang khusus. Merujuk pada catatan Antonio Gramsci, gerakan tersebut biasanya disebabkan oleh adanya hubungan dominasi menggunakan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Menurut Luky Djani, munculnya gerakan *people power*

⁵ Polisi Tangkap 101 Orang Diduga Provokator dalam <http://www.liputan6.com/news/read/39730-22/> Diakses 27 Mei 2019.

disebabkan oleh sejumlah elemen.⁶ *Pertama*, kekuatan mobilisasi massa. Kita tahu bahwa gerakan itu tidak besar jika tanpa mobilisasi yang kuat dan luas. Mengkaji berbagai persoalan dan menuntut bersamaan di jalanan.

Kedua, salah satu hal penting terbentuknya *people power* adalah beragamnya kelompok dan organisasi masyarakat maupun mahasiswa yang tergabung di dalamnya. Beragamnya orang di dalam gerakan ini akan semakin memperluas pengaruh, sehingga *people power* menjadi massa yang sangat besar. *Ketiga*, *people power* adalah pesta rakyat di mana mereka rela berpeluh dan meluangkan waktu. Namun pesta ini bukanlah pesta seperti pemilu, melainkan pesta di mana rakyat bebas menuntut permasalahan-permasalahan rezim. *Keempat*, gerakan *people power* adalah sah karena itu bagian dari hak rakyat.

People power yang kembali diwacanakan di pemilu 2019 tidak lepas dari hegemoni yang dilakukan kelas atas (elite politik) terhadap kelas bawah yaitu masyarakat. Propaganda yang dilakukan oleh kelas penguasa ialah dugaan kecurangan baik di KPU, Bawaslu, *quick count* lembaga-lembaga survei, dan di berbagai TPS. Contoh kecilnya surat suara yang sudah tercoblos di TPS yang berada di Malaysia dan berbagai kecurangan lain yang sudah masuk media Youtube, sehingga masyarakat luas banyak mengetahui.

Gerakan *people power* dalam catatan hegemoni Antonio Gramsci adalah mobilisasi atas massa dengan kesadaran yang sama, menarasikan aksi sebagai bentuk menegakkan kejujuran serta keadilan atas pemilu 2019, dan

⁶ Wiji Setiawan, "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Antara Indonesia dan Filipina", (Skripsi-Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), 6.

memanfaatkan masifnya pendukung untuk membawa kepada kekuasaan. Tentu dibalik gerakan tersebut ada intelektual sebagai organizer hegemoni. Namun persoalan penting yang diangkat dari penelitian ini bukanlah bagaimana gerakan *people power* di pemilu 2019, melainkan bagaimana pola hegemoni yang terjadi dalam gerakan aksi *people power* dalam pemilu 2019.

Tentu analisis hegemoni dalam gerakan *people power* ini sangat tidak mudah. Namun penulis sudah memilih alat analisis yaitu dari teori hegemoni yang pernah diangkat oleh Antonio Gramsci. Model analisis pembacaan yang digunakan adalah dekonstruksi. Tujuannya untuk menemukan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh kaum-kaum revolusioner.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola hegemoni kultural Antonio Gramsci pada gerakan *people power* dalam sengketa pilpres 2019?
2. Bagaimana jenis hegemoni pada gerakan *people power* dalam sengketa pilpres 2019 menurut pendekatan hegemoni Antonio Gramsci?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pola hegemoni kultural Antonio Gramsci pada gerakan *people power* dalam sengketa pilpres 2019

2. Untuk mengetahui bagaimana jenis hegemoni pada gerakan *people power* dalam sengketa pilpres 2019 menurut pendekatan hegemoni Antonio Gramsci

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Jauh dari kata sempurna, maka jauh juga kegunaan dan dampak positif dari penelitian. Namun sebagai hasil penelitian, maka penulis sangat berharap karya ini (meski tidak banyak) bisa menyumbang terhadap teori-teori yang sudah ada dan lebih mumpuni. Setidaknya mahasiswa bisa mengambil nilai positif jika ada dan mengkritisi karya ini agar selanjutnya ada karya-karya besar dan agung yang berdampak besar terhadap keilmuan Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini berguna bagi seluruh masyarakat dan bisa mengembangkan dan mempraktikkan hasil dari hasil penelitian ini. Selain itu juga bisa menjadi jembatan kecil bagi para mahasiswa untuk berpikir kritis menggunakan teori Antonio Gramsci terhadap persoalan-persoalan yang ada sekarang, utamanya terhadap gerakan sosial masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Kajian terhadap analisis wacana politik sekalipun sudah banyak dilakukan, namun berdasarkan penelusuran studi pustaka, belum ada yang meneliti langsung persoalan sengketa wacana dalam kontestasi pilihan presiden pada tahun 2019 di Indonesia melalui pendekatan hegemoni Gramsci. Oleh sebab itu, penulis mencoba mencari studi pustaka yang terkait dengan analisis wacana politik secara umum. Ini adalah upaya mengetahui misalnya sebab dan pengaruh dari kasus tersebut. Selain itu supaya menjadi pembandingan hasil kajian pustaka lain dengan hasil kajian analisis wacana melalui pendekatan logika hegemoni.

Berikut adalah rangkuman data kajian pustaka terkait analisis wacana politik yang telah dipublikasikan di Jurnal dan Skripsi:

1. Mark R. Thomson, "Presidentas and People Power in Comparative Asian Perspective."⁷
2. Putri Rezki Manan, "Pengaruh People Power dalam Suksesi Kepemimpinan di Mesir."⁸
3. R. Siti Zuhro, "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019"⁹
4. Arya Fernandes, "Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas."¹⁰

⁷ Mark R. Thomson, "Presidentas and People Power in Comparative Asian Perspective", *Phillippine Political Science Journal*, Vol 28, (2007).

⁸ Putri Rezki Manan, "Pengaruh People Power dalam Suksesi Kepemimpina di Mesir", (Skripsi-- Universitas Hasanuddin, 2017).

⁹ R. Siti Zuhro, "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16, No. 1, (Juni 2019).

5. Agus Saputro, “Agama dan Negara: Politik Identitas Menuju Pilpres 2019.”¹¹
6. Khoiril Huda dan Zulfa ‘Azza Fadhlika, “Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa.”¹²

Pertama artikel jurnal yang ditulis oleh Mark R. Thomson mengkaji tentang terjadinya gerakan rakyat *people power* di Asia, utamanya di Filipina yang disebabkan oleh kepemimpinan perempuan diktator yang memiliki politik warisan dari keluarganya dan berpotensi mengancam demokrasi. Kemudian yang kedua adalah skripsi dari Putri Rezki Manan yang mengkaji gerakan *people power* yang terjadi di Mesir, dimana gerakan rakyat tersebut di latar belakang oleh ke tidak puasan dan kekecewaan rakyat terhadap Presiden Mursi, yang mengkhianati hasil Revolusi 2011 dan melupakan cita-cita Revolusi tersebut, yang berupa kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan.

Yang ketiga artikel jurnal yang di tulis oleh R. Siti Zuhro sangat menarik bagi penulis. Karena beliau menyajikan permasalahan yang terjadi dalam pemilu 2019 yang kemudian menghasilkan temuan bahwa pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Dimana menurut beliau hal ini dikarenakan pilar-pilar penting dalam demokrasi yakni pemilu, partai politik,

¹⁰ Arya Fernandes, “Politik Identitas dalam Pemilu: Proyeksi dan Efektifitas, *Jurnal Centre For Strategic and Internasional Studies*, No. 1, (April 2019).

¹¹ Agus Saputro, “Agama dan Negara: Politik Identitas Menuju Pilpres 2019”, *Jurnal Asketik*, Vol. 2 No. 2, (Desember 2019).

¹² Khoiril Huda dan Zulfa ‘Azza Fadhlika, “Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa”, *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 4, No. 3 (2018).

civil society, dan media massa yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum berfungsi efektif dan belum maksimal.

Keempat artikel jurnal karya Arya Fernandes yang mengkaji perihal politik identitas dalam pemilu 2019 dimana beliau menghasilkan temuan bahwa mobilisasi pemilih berdasarkan isu-isu keagamaan tidak efektif dalam pemilu di tingkat nasional. Berbeda dengan yang terjadi di pilihan gubernur Jakarta yang bersifat lokal dengan komposisi latar belakang pemilih yang berimbang, baik dari sisi agama, suku, atau ras. Dalam tingkat nasional dengan komposisi latar belakang yang sangat beragam, kecenderungan pilihan publik terhadap pasangan calon masih sangat ditentukan oleh faktor kredibilitas, integritas, dan program kerja oleh pasangan calon tersebut.

Kelima artikel jurnal karya Agus Saputro tentang agama dan negara. Mengangkat tema yang sama yakni politik identitas dengan artikel sebelumnya karya Arya Fernandes, artikel jurnal dari Agus Saputro lebih kepada mengulas sejarah relasi agama dan negara dalam aktivitas perpolitikan di Indonesia. Dimana memang gaya politik identitas masih menjadi primadona yang digunakan elit politik untuk memenangkan suara rakyat. Agama yang sejatinya menjadi elemen pemersatu namun oleh kalangan elit politik digunakan sebagai senjata politik yang menyebabkan celah perpecahan. Sehingga dari sini rakyat sebagai pemilih harus jeli dalam menentukan pilihan politiknya.

Kemudian yang keenam artikel dari Khoiril Huda dan Zulfa 'Azzah Fadhlaka yang mengkaji hal-hal mengenai pemicu perpecahan di masyarakat

dalam menyambut kontestasi pemilu presiden 2019. Upaya-upaya yang dilakukan para calon pemimpin untuk memenangkan pemilihan umum rupanya menimbulkan rekasi yang berbeda-beda di kalangan lapisan masyarakat bawah dan menghasilkan atmosfer panas dalam suhu politik nasional. Sehingga diharapkan kepada calon pemimpin dan para elit politik untuk berkontestasi secara sehat, tidak menggunakan isu sara, penyebaran hoax, dan berbagai hal yang dapat memicu munculnya perpecahan di kalangan masyarakat.

Berbeda dari karya penelitian diatas, skripsi yang penulis sajikan disini ialah mengkaji gerakan *people power* yang terjadi dalam kontestasi pilihan presiden 2019. Dimana dalam pilihan presiden kemarin terdapat gerakan aksi *people power* yang sebagai respon adanya wacana kecurangan dalam pemilu 2019. Adanya gerakan *people power* tersebut sangat menarik dikaji lebih lanjut dengan model pembacaan teori hegemoni Antonio Gramsci sebagai pisau analisis untuk membedah pola hegemoni yang terjadi dalam gerakapan *people power* tersebut.

F. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif yang menurut Kutha Ratna fokus pada data alamiah yang ada hubungannya dengan konteks yang diambil.¹³

¹³ Nyoman Kutha Ratna, *Teori Metode dan Teknik: Penelitian Sastra* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 48.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah kualitatif yang bersumber dari berbagai data kepustakaan sekaligus meneliti referensi terkait, misalnya data primer dan sekunder.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terbagi dua. Pertama, sumber data primer dan kedua sumber data sekunder.

Sumber Data Primer adalah sumber utama yang penulis ambil dari buku karya Antonio Gramsci, jurnal, website dan media youtube yang terkait dengan objek penelitian ini.

Sumber Data Sekunder adalah sumber pendukung yang penulis juga ambil dari buku, jurnal, website dan media youtube terkait dengan objek kajian ini.

3. Metode Penggalan Data

Peneliti ini juga menyajikan data dalam bentuknya yang deskriptif analitik karena hubungannya dengan pendekatan yang peneliti gunakan. Tekniknya yaitu pembacaan dekonstruksi pada teks pemberitaan media sosial. Serta tentang cara dan bagaimana pendekatan logika hegemoni yang penulis ambil dari buku Antonio Gramsci langsung sebagai sumber primer dan buku-buku lainnya yang terkait.

4. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan penggalan data dan pengolahan, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Berikut analisis data yang penulis lakukan:

a. Analisis Historis

Analisis historis merupakan telaah terhadap tokoh yang penulis jadikan landasan atau Teknik pembacaan, yakni Antonio Gramsci

b. Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan usaha untuk menggali dengan jelas hegemoni Antonio Gramsci sebagai pembacaan terhadap objek yang peneliti ambil.

c. Analisis Kritis

Analisis kritis merupakan tujuan utama dari penelitian ini. Kegunaannya tentu tidak hanya sekedar deskriptif, tapi juga kritis. Sehingga menghasilkan analisis mendalam terhadap objek yang peneliti ambil.

G. Kerangka Teoretis

Konsep hegemoni Gramsci dikembangkan atas dasar upaya dekonstruksi terhadap konsep-konsep Marxis ortodoks. Teori hegemoni Gramsci sering juga disebut sebagai teori kultural atau ideologis general dan digunakan untuk memahami bentuk-bentuk politis, kultural, dan ideologi

yang dianggap memiliki kekurangan untuk memformasi masyarakat.¹⁴ Teori ini juga muncul sebagai kritik dan alternatif bagi pendekatan dan teori perubahan sosial sebelumnya yang didominasi oleh penentuan kelas dan ekonomi Marxisme tradisional.

Menurut Gramsci, hegemoni didefinisikan sebagai sesuatu yang kompleks, yang sekaligus bersifat ekonomik dan etis-politik. Hegemoni menghubungkan antara kelas dengan kekuatan sosial lain. Kelas hegemonik (kelas yang memimpin) menurut Gramsci adalah kelas yang mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan system aliansi melalui perjuangang politik dan ideologis.¹⁵ Supremasi suatu kelompok sosial menyatakan dirinya dalam dua acara, yakni sebagai ‘dominasi’ dan sebagai ‘kepemimpinan moral dan intelektual’ suatu kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok antagonistic yang cenderung ia “hancurkan”, atau bahkan ia taklukkan dengan kekuatan tentara.¹⁶ Dimana dalam hal ini menggambarkan adanya dominasi suatu kelas yang terjadi karena aspek ideologis politik.

Dalam pemikiran Gramsci, hegemoni berhubungan dengan sikap dan strategi dalam mengkoordinasikan dan memperoleh kekuasaan yang dilakukan oleh organisasi atau kelompok tertentu dalam praktek kekuasaan.¹⁷

Sehingga dalam hal ini menuntut adanya kontak antara yang memimpin dan

¹⁴ Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra: dari Strukturalisme Genetik sampai Post-modernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 61.

¹⁵ Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci* (Yogyakarta: INSIST, 2004), 22.

¹⁶ Faruk, *Pengantar Sosiologi*, 68.

¹⁷ Heru Kurniawan, *Teori, Metode, dan Aplikasi Sosiologi Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 72.

yang dipimpin. Kemudian agar mampu mencapai kepemimpinannya, ideologi harus disebar, dimana penyebaran ini dapat dilakukan dengan cara memperoleh dukungan melalui propaganda media massa, membangun aliansi strategis dengan barisan sakit hati dan Pendidikan pembebasan melalui sekolah-sekolah yang meningkatkan kesadaran diri dan sosial. Oleh karena itu, hegemoni pada hakikatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandangn problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan.¹⁸

H. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini tersusun secara sistematis, maka penulis mencoba menyusun sistematika pembahasan dari bab awal sampai akhir.

Bab I berisi pembahasan tentang *latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.*

Bab II berisi pembahasan tentang teori hegemoni Antonio Gramsci yang penulis gunakan sebagai objek formal dari penelitian ini.

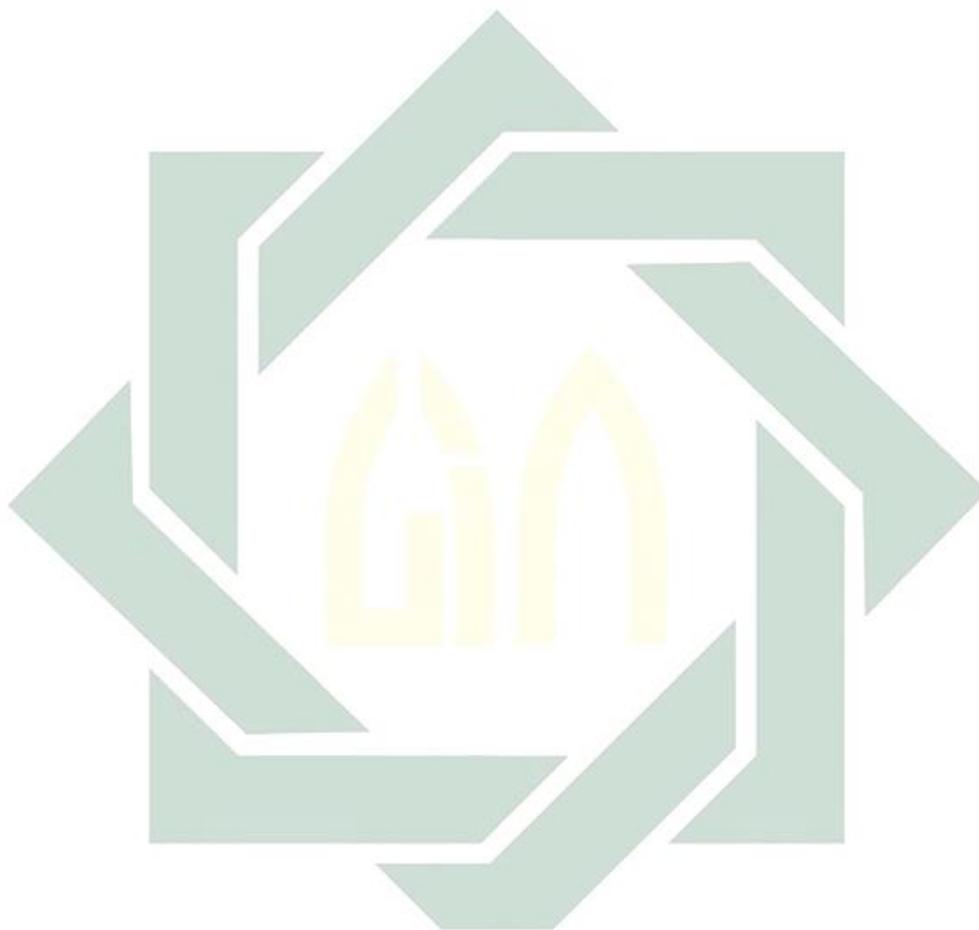
Bab III berisi pembahasan tentang bagaimana latar belakang gerakan dan ideologi aksi *people power* 22 Mei tersebut sebagai objek material dari penelitian ini.

Bab IV berisi pembahasan analisis inti dari penelitian ini tentang bagaimana pola hegemoni kultural Gramsci pada gerakan *people power* dan

¹⁸ Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonia Gramsci, Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 120-121.

bagaiman jenis hegemoni pada gerakan *people power* dalam sengketa pilpres 2019.

Bab V berisi kesimpulan dari analisis yang sudah dilakukan di bab iv.



BAB II

BIOGRAFI DAN HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI

A. Biografi Antonio Gramsci

Antonio Gramsci lahir pada tanggal 22 Januari 1891 di Ales, sebuah kota kecil yang terletak di Sardinia, Italia.¹ Dan meninggal di kota Roma pada tanggal 27 April 1937.² Beliau adalah anak ke empat dari tujuh bersaudara. Ayah beliau bernama Francesco yang merupakan anak dari seorang kolonel Naples yang berasal dari Gaeta daerah semenanjung Italia. Sementara ibunya berasal dari Sardinia.³

Latar belakang Pendidikan Gramsci dimulai ketika bersekolah di Ghilarza pada tahun 1898. melanjutkan kembali pendidikannya di kota Santalussurgiu dan lulus pada tahun 1908, kemudian melanjutkan di sekolah menengah atas di Cagliari. Dari sini pada tahun 1911 kemudian Gramsci mendapatkan beasiswa di Universitas Turin.⁴

Menginjak usia 46, Gramsci telah berhasil menciptakan berbagai karya dan buku. Karya Gramsci ini terbagi dalam dua periode, yakni pada masa ia aktif berpolitik dan ketika ia berada di dalam penjara. beberapa karyanya antara lain: *History, Philosophy and Culture in the Young Gramsci* yang diterbitkan di St. Louis pada tahun 1975, *Letters from Prison* yang

¹ Erich Fromm, *Revolusi Harapan; Menuju Masyarakat Teknologis yang Manusiawi*, terj. Kamdani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 33.

² Antonio Gramsci, *Prison Notebooks; Catatan-catatan dari Penjara*, terj. Teguh Wahyu Utomo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), XXVII.

³ Ibid., XXVII.

⁴ Ibid., XXVIII.

diterbitkan di New York tahun 1973, *Selection from Cultural Writing* diterbitkan di London tahun 1957, *New Edinburgh Review, Three Special Gramsci Issue* yang diterbitkan tahun 1974, *Selection from Political Writing: 1910-1920* yang diterbitkan di London tahun 1977, *Selection from Political Writing: 1921-1926* yang diterbitkan di London tahun 1978, *Selection from the Prison Notebooks* yang diterbitkan di London tahun 1971, *The Modern Prince and Other Political Writings* diterbitkan di London tahun 1957.⁵

B. Hegemoni

Akar kata hegemoni ialah *eugemonia* yang berasal dari bahasa Yunani kuno. Di Yunani *eugemonia* diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota secara individual misalnya dominasi posisi yang dilakukan oleh negara kota Athena dan Sparta terhadap negara-negara lain yang sejajar.⁶ Hegemoni merupakan pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan suatu negara atas negara lain. Dalam pengertian saat ini, hegemoni yang menunjukkan sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu telah bergeser bukan hanya negara dengan negara namun negara dengan masyarakat.⁷ Maksud disini ialah dalam memaknai hegemoni tidak kaku hanya dalam arti arfiahnya saja, namun telah mengalami perkembangan dalam makna.

⁵ Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonia Gramsci, Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 55

⁶ *Ibid.*, 115.

⁷ KBBI

Embrio hegemoni muncul atas pandangan Karl Marx terhadap negara. Marx mengkritik Hegel atas pandangannya terhadap negara. Dimana menurut Hegel negara adalah perwujudan ide yang tertinggi, realitas tertinggi atau suatu ide yang universal. Perwujudan itu berlangsung dalam sejarah. Karena negara merupakan ide yang tertinggi maka negara tidak mungkin diatur oleh pandangan manusia.⁸ Keinginan negara adalah keinginan umum untuk kebaikan semua orang, karena itulah negara harus dipatuhi.⁹ Berangkat dari konsepsi tersebut maka Marx memberikan kritik dengan setidaknya terdapat tiga argument teoritis dari Marx.

Pertama, Marx memandang kondisi material dari masyarakat sebagai basis dari struktur sosial dan kesadaran manusia. Maka bentuk negara muncul dari hubungan-hubungan produksi, bukan berasal dari perkembangan umum pemikiran manusia, atau keinginan manusia untuk berkolektif sebagaimana pandangan Hegel. Kedua, Marx berpandangan bahwa negara merupakan ekspresi politik dari struktur kelas yang melekat dalam produksi. Berbeda dengan Hegel yang berpandangan bahwa negara ialah representasi dari kolektivitas sosial yang dilindungi dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara. Ketiga, bahwa negara dalam masyarakat borjuis merupakan senjata represif dari kaum borjuis. Hakikat negara sebagai kekuatan represif ialah untuk menjaga pertentangan kelas, dimana yang berfungsi sebagai pelayan bagi kelas dominan yaitu kelas borjuis.¹⁰

⁸ Patria dan Arief, *Antonio Gramsci*, 99-100.

⁹ Arief Budiman, *Teori Negara. Negara, Kekuasaan dan Ideologi* (Jakarta: Gramedia, 1996), 5.

¹⁰ Patria dan Arief, *Antonio Gramsci*, 106.

Berawal dari konsep Marx terhadap negara tersebut kemudian Plekanov seorang marxis dari Rusia membangun konsep hegemoni pertama kali pada tahun 1880. Dimana konsep ini lahir dan dibangun dengan tujuan sebagai strategi untuk menjatuhkan pemerintahan Tsar. Dalam definisi ini hegemoni mengacu dalam pengertian kepemimpinan hegemonik proletariat dan perwakilan-perwakilan politik mereka serta aliansi-aliansi dengan kelompok lain seperti kaum borjuis kritis, petani dan intelektual, yang memiliki keinginan sama untuk menjatuhkan pemerintahan Tsar.¹¹

Dari pengertian di atas kemudian Lenin mendefinisikan hegemoni sebagai konsep upaya atau jalan menuju revolusi, strategi yang harus dijalankan oleh kelas proletar untuk merebut kekuasaan. Lenin melihat bahwa munculnya perlawanan oleh para pekerja melalui perlawanan ekonomi masih merupakan perlawanan yang bersifat spontan sehingga menurut Lenin perlu adanya suntikan kesadaran yang bersifat politis. Lenin beranggapan bahwa dalam diskusi dan ide mengenai hegemoni ialah peran kepemimpinan teoretis yang kemudian secara kongret dimanifestasikan dan di artikulasikan dalam sebuah partai pelopor.¹² Disini bagi Lenin hegemoni lebih menyangkut persoalan kepemimpinan. Kemajuan yang dicapai Lenin dibandingkan pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang gagasan hegemoni, adalah menekankan peran kepemimpinan teoretis. Menurut Lenin, teori adalah esensial.¹³

¹¹ Ibid., 116.

¹² Ibid., 117.

¹³ Robert Bocoock, *Pengantar Komprehensif untuk Memahami Hegemoni*, terj. Ikramullah Mahyudin (Yogyakarta: Jalasutra, 2015), 23.

Konsep Lenin terhadap hegemoni tersebut, kemudian hegemoni menjadi perbincangan serius dan membuat Gramsci menjadikannya sebagai pembahasan bagian yang penting dalam karyanya *Selection from the Prison Notebooks*. Konsepsi hegemoni yang lahir dari pemikiran Gramsci ialah hasil dialektis antara dikotomi tradisional karakteristik pemikiran Machiavelli sampai Pareto.¹⁴ Dari karakteristik pemikiran tersebut, Gramsci mengambil tentang kekuatan (*force*) dan persetujuan (*consent*). Menurut Gramsci ada dua cara bagi kelas sosial untuk memperoleh keunggulannya yakni melalui cara dominasi atau paksaan dan melalui kepemimpinan intelektual dan moral.¹⁵ Cara yang terakhir inilah yang kemudian oleh Gramsci disebut sebagai hegemoni.

Teori hegemoni Gramsci adalah salah satu teori politik paling penting di abad XX. Teori ini dibangun di atas premis pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik. Di mata Gramsci, agar yang dikuasai tidak hanya harus mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan “hegemoni” atau menguasai dengan kepemimpinan moral dan intelektual secara konsensual.¹⁶

¹⁴ Patria dan Arief, *Antonio Gramsci*, 119.

¹⁵ *Ibid.*, 119.

¹⁶ Muhadi Sugino, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 31.

C. Hegemoni Gramsci

Titik awal pemikiran Gramsci dalam konsep hegemoni ialah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas dibawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi.¹⁷ Hegemoni juga bukan merupakan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis.¹⁸ Menurut Gramsci hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang diperoleh melalui mekanisme konsensus dari pada melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Misalnya dengan melalui cara institusi yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dari masyarakat. Oleh karena itu, pada hakekatnya hegemoni adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan.¹⁹

Secara umum hegemoni mengoreksi pandangan marxis kuno. Pertama, hegemoni tidak memutar balikkan model basis-superstruktur tradisional marxis, melainkan menafsirkan kembali berdasarkan faham Crocean. Penggagas konsep ini menolak interpretasi “materialisme vulgar” dan kecenderungan sosiologi positivis evolusioner. Kedua, hegemoni melihat negara sebagai suatu yang abadi tidak memiliki konteks historis, menstransendenkan masyarakat sebagai kolektivitas yang ideal. Ketiga, dalam konsep hegemoni dikenal adanya skematisasi pemilahan intelektual ke

¹⁷ Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci* (Yogyakarta: INSIST, 2004), 19.

¹⁸ Ibid., 20.

¹⁹ Patria dan Arief, *Antonio Gramsci*, 120-121.

dalam intelektual organik dan intelektual tradisional. Keempat, hegemoni memiliki makna ideologi dominan. Misalnya yang terjadi di Indonesia, Pada rezim orde baru, ideologi dominan yang dijadikan pembenaran kebijakan bagi aparatur yaitu “pembangunan”. Hal itu menunjukkan bahwa istilah demi kepentingan umum atau pembangunan nasional untuk segala lapisan masyarakat yang biasanya dipakai sebagai pembenaran terhadap penggunaan kekuasaan negara untuk memaksa seorang atau sekelompok warga agar bersedia mematuhi keinginan negara.²⁰

Terjadinya hegemoni menurut Gramsci, ialah dikarenakan kelas penguasa berupaya mempertahankan kekuasaan dan dominasi nyata terhadap kaum proletar melalui cara-cara yang meyakinkan, yaitu melalui kontrol ide atau konsensus dalam masyarakat.²¹ Disini Gramsci melihat bahwa posisi-posisi subyek kepemimpinan moral dan intelektual akan membentuk suatu kesadaran dan persetujuan spontan yang selanjutnya akan membentuk suatu kehendak yang bersifat kolektif melalui ideologi yang menjadi pengikat.²² Hegemoni merupakan sebuah organisasi konsensus atau persetujuan spontan masyarakat. Gramsci mengembangkan konsep hegemoni yang berpijak pada kepemimpinan yang sifatnya “intelektual dan moral”. Kepemimpinan ini terjadi karena adanya persetujuan yang bersifat suka rela dari kelas bawah

²⁰ Ekarini Saraswati, *Sosiologi Sastra: Sebuah pemahaman Awal* (Malang: Bayu Media, 2003), 141-143.

²¹ Gramsci, *Prison Notebook*, 17.

²² Ernesto Laclau dan Chanral Mouffe, *Hegemoni dan Strategi Sosialis; Post Maxisme dan Gerakan Sosial Baru*, terj. Eko Prasetyo Darmawan (Yogyakarta: Resist Book, 2008), 97.

atau masyarakat terhadap kelas atas yang memimpin, terutama persetujuan dari kelompok-kelompok utama dalam suatu masyarakat.²³

Gramsci memulai analisisnya dengan sebuah pernyataan kriteria metodologi yang harus digunakan oleh studi kita sendiri. Bahwa supremasi sebuah kelompok sosial memanifestasikan dirinya dengan dua cara, sebagai dominasi dan sebagai kepemimpinan intelektual dan moral.²⁴ Dia membedakan antara dominasi atau kekerasan dengan kepemimpinan intelektual dan moral dalam proses hegemoni. Menurutnya bahwa:

Suatu kelompok sosial bisa, bahkan harus, menjalankan kepemimpinan sebelum merebut kekuasaan pemerintahan (hal ini jelas merupakan salah satu syarat utama memperoleh kekuasaan tersebut). Kesiapan itu pada gilirannya menjadi sangat penting ketika kelompok itu menjalankan kekuasaan, bahkan seandainya kekuasaan itu tetap berada di tangan kelompok tersebut, maka mereka harus tetap memimpin.²⁵

Gramsci mengubah makna hegemoni yang strategi (sebagaimana menurut Lenin), menjadi sebuah konsep yang kemudian menjadi jalan dalam memahami masyarakat dengan tujuan untuk merubahnya.²⁶ Hegemoni merupakan hubungan antara kelas dengan kekuatan sosial lain, kelas hegemoni atau kelompok hegemoni. Kelompok hegemoni adalah kelas yang mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan cara

²³ Moh. Hefni, "Runtuhnya Hegemoni Negara dalam Menentukan Kurikulum Pesantren", *Jurnal Karsa*, Vol. 19, No. 1 (2011), 64.

²⁴ Gramsci, *Prison Notebook*, 63.

²⁵ Steve Jones, *Antonio Gramsci* (London: Routledge, 2006), 15.

²⁶ Wiyatmi, *Sosiologi Sastra: Teori dan Kajian Terhadap Sastra Indonesia* (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013), 163.

menciptakan dan mempertahankan system aliansi melalui perjuangan politis dan ideologis.²⁷

Gramsci mengontraskan aturan (*rute*), yang merupakan kontrak politik langsung yang menggunakan kekerasan jika perlu, dengan hegemoni, yaitu proses sosial yang dijalankan secara menyeluruh yang terorganisasi secara praktis oleh makna-makna khusus dan dominan, nilai dan paham semacam yang dapat diabstraksi sebagai “pandangan-dunia” atau “tampilan kelas”. Hegemoni sebagai bentuk kontrol sosial yang terinternalisasi yang membuat pandangan tertentu tampak “alami” atau tak nampak sehingga hampir tidak seperti pandangan sama sekali, “hanyalah perihal apa adanya”.²⁸

Hegemoni tidak hanya merupakan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik atau kepemimpinan ini meliputi, persetujuan spontan yang diberikan oleh sejumlah besar massa, mengenai arah umum yang dibebankan pada kehidupan pada kehidupan sosial oleh kelompok dominan. Persetujuan tersebut, dikarenakan adanya prestise dan kepercayaan yang dinikmati oleh kelompok dominan karena posisi dan fungsi mereka dalam dunia produksi. Sedangkan fungsi kedua adalah sebagai apparatus negara yang mempunyai kekuasaan, yang secara hukum memiliki kemampuan menguatkan disiplin pada kelompok-kelompok yang tidak setuju, baik secara aktif maupun pasif.²⁹ Fungsi pengaturan hegemoni sosial

²⁷ Simon, *Gagasan-gagasan*, 23.

²⁸ Peter Barry, *Beginning Theory, Pengantar Komprehensif Teori Sastra dan Budaya*, terj. Harviah Widiawati dan Evi Setyarini (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 192-193.

²⁹ Gramsci, *Prison Notebook*, 63.

dan dominasi negara memberikan peningkatan pada kaum kerja tertentu dan seluruh masyarakat.

Kelas penguasa tidak akan cukup menggunakan ekonomi dan kekuatan fisik dalam mempertahankan *status quo*, akan tetapi mereka perlu memastikan kontrol terhadap ide-ide. Sehingga dengan jalan hegemoni ini adalah upaya dalam mengontrol ide-ide dan memanipulasi kesadaran sosial masyarakat. Hegemoni masuk melalui jalur persetujuan spontan yang disusun oleh kelompok dominan untuk terjadinya konsensus dalam masyarakat. Apa yang dilihat Gramsci, hegemoni yang paling dominan dan tidak terlihat adalah melalui budaya termasuk juga melalui instansi pendidikan, media TV dan radio. Jalur-jalur tersebut diberukan secara terus-menerus ideologi-ideologi kelompok-kelompok tertentu untuk membentuk nalar dan paradigma, dan system berpikir, hingga tertanamnya ideologi. Dalam pandangan Gramsci karakteristik hegemoni yang berusaha diciptakan kelompok tertentu melalui konsensus³⁰ yaitu hegemoni dalam nalar atau paradigma berpikir, gambaran hidup ideal, budaya dan nilai-nilai, serta *common-sense*. Semua proses hegemoni tersebut dilakukan oleh mereka yang berkuasa, dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, atau kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.

Bagi Gramsci, hegemoni berarti ialah situasi dimana suatu blok historis atau faksi kelas berkuasa menjalani otoritas sosial dan kepemimpinan atas kelas-kelas subordinat melalui kombinasi antara kekuatan dengan

³⁰ Ibid., 17.

persetujuan, dimana secara timbal balik saling mengisi tanpa adanya kekuatan secara berlebihan dalam memaksa persetujuan. Upaya yang sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa kekuatan tersebut seakan-akan hadir berdasarkan persetujuan mayoritas yang diekspresikan oleh apa yang disebut dengan organ opini publik.³¹

Dalam konteks teori Gramsci, inti dari hegemoni adalah keberhasilan kelompok penguasa mendapatkan persetujuan dari kelompok subordinat. Dalam hegemoni, kelompok subordinat yang dikuasai menerima dan memberi persetujuan atas ide-ide dan kepentingan-kepentingan politik dari kelompok yang menguasai mereka. Hegemoni Gramsci adalah pencapaian penguasaan yang paling legitimate, karena kekuasaan mereka diterima dalam system ideologi, kebudayaan, nilai-nilai, maupun norma-norma oleh kelompok yang dikuasai.³²

D. Konsensus

Konsep Hegemoni menurut Gramsci ialah terbentuk dan dibangun melalui mekanisme konsensus atau kesepakatan spontan dari masyarakat atas manipulasi realitas yang disuguhkan. Dalam berbicara konsensus, Gramsci selalu mengaitkan dengan spontanitas yang bersifat psikologis yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosio-politis atau pun aspek aturan yang lainnya.³³ Konsensus menurut Gramsci lebih mewujudkan suatu

³¹ Chris Barker, *Cultural Studies, Teori dan Praktik*, terj. Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), 62-63.

³² Anwar, *Teori Sosial*, 81.

³³ Patria dan Arief, *Antonio Gramsci*, 125.

hipotesis bahwa terciptanya karena ada dasar persetujuan.³⁴ Bagi Gramsci, hegemoni melalui konsensus muncul melalui komitmen aktif atas kelas sosial yang secara historis lahir dalam hubungan produksi. Untuk itu, disini Gramsci mengatakan secara tidak langsung bahwa konsensus sebagai “komitmen aktif” yang didasarkan pada adanya pandangan bahwa posisi tinggi yang ada sah (*legitimate*). Konsensus secara historis “lahir” karena prestasi yang berkembang dalam dunia produksi.³⁵

Bagi kelas pekerja, pada dasarnya sebuah konsensus yang diterima oleh mereka ialah bersifat pasif. Kemunculan konsensus bukanlah karena kelas yang terhegemoni dengan menganggap struktur sosial yang ada itu sebagai keinginan mereka (kelas pekerja). Namun justru sebaliknya, hal ini terjadi karena mereka kekurangan basis konseptual yang membentuk kesadaran yang dapat memungkinkan mereka dapat memahami realitas sosial secara efektif.³⁶

Menurut Gramsci pertentangan kelas secara efektif dinetralisasikan dalam masyarakat kapitalis lanjut. Karena dengan adanya pengawasan yang ketat yang dilakukan kaum borjuis membuat pertentangan tersebut semakin melemah dan menjadi sebuah keinginan untuk mendapatkan upah atau gaji yang lebih baik. Sehingga membuat pertentangan menjadi sebuah ilusi. Menurut Gramsci ini merupakan konsensus terselubung yang hanya menjadikan hegemoni kaum borjuis semakin kuat yang mana ia menyebutnya

³⁴ Heru Hendarto, *Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci; dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan* (Jakarta: Gramedia, 1993), 81.

³⁵ Patria dan Arief, *Antonio Gramsci*, 126.

³⁶ *Ibid.*, 127.

dengan gejala integrasi budaya. Lebih lanjut Gramsci mengambil kesimpulan bahwa hal ini bisa terjadi karena pendidikan dan mekanisme kelembagaan.

Pendidikan yang ada tidak pernah menyediakan dan membangkitkan kemampuan untuk berpikir secara kritis dan sistematis bagi kaum buruh. Sedangkan di lain pihak, mekanisme kelembagaan seperti misalnya sekolah, greja, partai-partai politik, media massa dan sebagainya mendi 'kepanjangan tangan' bagi kelompok yang ingin berkuasa untuk menentukan ideologi yang mendominasi. Disini bahasa menjadi sarana penting untuk melayani fungsi hegemonis tersebut. Konflik sosial kemudian dibatasi baik intensitasnya maupun ruang lingkungannya, karena ideologi yang ada telah membentuk keinginan-keinginan, nilai-nilai dan harapan menurut system yang telah ditentukan.³⁷

Watak dari sebuah konsensus massa dalam masyarakat kapitalis sebagai kesadaran yang bertentangan. Artinya bahwa hegemoni yang dilakukan kelas borjuis terhadap kaum proletary ialah konsensus yang berifat samar-samar. Dimana menurut Gramsci hegemoni hasil konsensus massa terdapat dalam tiga tingkatan, yaitu hegemoni total, hegemoni yang merosot, dan hegemoni yang minimum.³⁸

Hegemoni total (*integral*) ialah ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Hegemoni ini tampak dalam hubungan organis antara pemerintah dan yang diperintah. Kemudian hegemoni yang merosot

³⁷ Ibid., 127.

³⁸ Hendarto, *Mengenal Konsep*, 82.

(*decadent*), hegemoni ini ditandai dengan adanya potensi disintegrasi yang tampak dalam konflik tersembunyi yang berada di bawah permukaan sosial. Artinya sekalipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan atau mencapai sasaran, namun mentalitas massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan apa yang menjadi pemikiran dominan dari subjek hegemoni, sehingga integrasi budaya maupun politik mudah runtuh. Yang terakhir adalah hegemoni minimum (*minimal hegemony*) dimana dalam bentuk ini hegemoni bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Dengan kata lain, bahwa kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi mereka dengan kelas lain dalam masyarakat. mereka hanya mempertahankan peraturan melalui transformasi penyatuan para pemimpin budaya, politik, sosial, maupun ekonomi yang secara potensial bertentangan dengan apa yang dicita-citakan oleh kelompok hegemonis tersebut.³⁹

E. Intelektual Sebagai Organisier Hegemoni

Gramsci mencoba menganalisis suatu cara aturan politik dan hegemoni dari sebuah kelas dalam sebuah blok historis yang diaktualisasikan secara nyata dan secara kongrit terorganisir. Gramsci menguji persoalan peran intelektual sebagai bagian dari tujuannya untuk memahami kesatuan nyata dari basis dan superstruktur. Serat penghubung yang terbentuk antara wilayah-wilayah dari realitas sosial, ialah dilakukan

³⁹ Patria dan Arief, *Antonio Gramsci*, 129.

oleh intelektual.⁴⁰ Kata 'intelektual' disini bukan dipahami sebagai pengertian yang biasa, melainkan suatu strata sosial yang menyeluruh yang menjalankan suatu fungsi organisasional dalam pengertian yang luas misalnya dalam lapangan produksi, kebudayaan, atau pun dalam administrasi politik.⁴¹

Posisi intelektual dalam kompleksitas hubungan sosial pada kenyataannya telah memenuhi beragam posisi. Dalam dunia superstruktur, kaum intelektual ini menampilkan fungsi organisasional dan konektif baik di dalam masyarakat sipil atau hegemoni dan wilayah masyarakat politik atau negara. Dalam karyanya *Selections from The Prison Notebooks*, Gramsci menyebutkan,

Kaum intelektual merupakan deputi dari kelompok dominan yang menjalankan fungsi khusus dari hegemoni sosial dan pemerintahan sosial. Dalam hal ini mencangkup:

1. Persetujuan spontan yang diberikan oleh populasi massa yang besar kepada kepemimpinan umum yang dilakukan oleh kelompok dominan atas kehidupan sosial; persetujuan ini bersifat 'historis' yang disebabkan oleh prestise (dan kepercayaan diri yang konsekuen) dimana kelompok dominan menikmatinya karena posisi dan fungsi mereka dalam dunia produksi.
2. Aparat kekerasan negara yang secara 'legal' memaksakan disiplin pada kelompok-kelompok ini pada siapa yang tidak setuju baik secara aktif maupun pasif. Apparatus ini, bagaimana pun juga digunakan untuk seluruh masyarakat sebagai antisipasi da;am momen krisis dari kepemimpinan atau manakala persetujuan spontan telah melemah.

Analisis Gramsci yang paling menonjol tentang peran dan posisi intelektual dalam masyarakat modern adalah kompleksitas dunia harus tetap diuji dalam realitas kongret. Kompleksitas ini hanya dapat didekati secara

⁴⁰ Ibid., 157.

⁴¹ Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra: dari Strukturalisme Genetik sampai Post-modernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 150.

analisis multi dimensi. Dimensi ini merujuk pada pada tipe kategorisasi yang dapat digunakan pada setiap realitas sosial.⁴² Dimana dalam hal ini Gramsci membaginya menjadi dua yaitu intelektual ‘organik’ dan intelektual ‘tradisional’.

Menurut Gramsci, intelektual organik berhubungan langsung dengan cara produksi yang dominan. Tipe intelektual organik ini, berhubungan dengan kelompok sosial tertentu dan memberikannya homogenitas serta kesadaran tentang fungsinya, bukan hanya di bidang ekonomi tetapi juga dibidang sosial politik. Intelektual organik adalah berasal dari kelas tertentu yang bisa jadi berasal dari kelas borjuis dan memihak mereka dan dapat pula berasal dari kelas buruh yang berpihak kepada perjuangan kelas buruh tersebut. Kelompok intelektual organik ini berpenetrasi sampai ke massa. Mereka memberikan sebuah pandangan dunia baru dan menciptakan kesatuan antara bagian atas dan bawah. Menurut Gramsci:

Kebutuhan kontak antar kaum intelektual dan bersahaja bukan untuk membatasi aktivitas ilmiah dan mempertahankan kesatuan pada tingkat massa yang rendah, tetapi justru untuk membangun suatu blok intelektual moral yang memungkinkan kemajuan intelektual massa, bukan saja intelektual kecil.⁴³

Sedangkan dalam kategori kedua yaitu intelektual tradisional ialah merupakan intelektual yang dapat dikategorikan sebagai intelektual otonom dan merdeka dari kelompok sosial dominan. Kelompok ini memisahkan intelegensi dari tatanan kaum borjuis. Intelektual tradisional ialah mereka

⁴² Ibid., 159.

⁴³ Richard Bellamy, *Teori Sosial Modern: Perspektif Itali*, terj. Vedi R. Hadiz (Jakarta: LP3ES, 1990), 199.

yang memiliki tugas-tugas kepemimpinan intelektual dalam suatu *given society*. Dalam intelektual tradisional ini, Gramsci mencontohkannya sebagai golongan rohaniawan, filsuf, seniman, manusia literer dan artis.⁴⁴

Menurut Gramsci, dalam posisinya yang seperti itu, tugas dari intelektual tradisional ialah menuntaskan ketidak menentuan sikap dan bergabung dalam barisan kelompok kelas yang revolusioner. Dimana hal ini tentu kaum intelektual tradisional secara organis harus berhubungan dengan kelas buruh, atau menjadi bagian dari kelas yang tertindas.

F. Pertarungan Posisi

Bagi Gramsci, wilayah kesadaran adalah hal utama dalam perjuangan kelas bawah melawan kelas dominan. Dari sini kemudian Gramsci tertarik menganalisa perkembangan kapitalisme di negara-negara barat untuk mengetahui proses perubahan yaitu kelas bawah untuk memenangkan hegemoni dari kelas atas. Dan juga ia memahami kegagalan gerakan kelas buruh di Turin pada 1919-1920, dimana pada saat itu kaum revolusioner Italia gagal mencari strategi yang relevan untuk menghadapi hegemoni kapitalis.⁴⁵ Berangkat dari konsepsi hegemoni, Gramsci berkeinginan untuk memformulasikan pendekatan baru terhadap revolusi sosialis, dimana hal ini dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan unik dalam perkembangan pasca revolusi Rusia. Disini Gramsci melihat munculnya kekuatan bentuk-bentuk superstruktur yang dibentuk oleh perkembangan kapitalisme. Oleh karena itu,

⁴⁴ Patria dan Arief, *Antonio Gramsci*, 163.

⁴⁵ *Ibid.*, 168.

Gramsci melihat perlu adanya strategi dan taktik baru bagi partai revolusioner menghadapi tantangan yang kompleks. Strategi yang kemudian Gramsci tawarkan ialah apa yang disebut dengan perang posisi (*war of position*). Menurut Gramsci, setidaknya strategi ini memiliki dua elemen.

Pertama, ia menekankan bahwa setiap negara membutuhkan ‘survei yang tepat’ dalam mengembangkan strategi revolusinya. Cara ini berbeda dengan apa yang dikembangkan oleh Marx dan Engels yang menggunakan strategi serangan frontal pada negara atau revolusi bersenjata yang melawan senjata koersif dari kaum borjuis.⁴⁶ Disini Gramsci percaya bahwa setiap negara partai komunis harus mengembangkan sendiri rencananya dalam membangun sosialisme sesuai dengan konteks politik tertentu yang dihadapinya.

Kedua, basis dari ‘perang posisi’ ialah pada gagasan mengepung apparatus negara dengan suatu counter-hegemoni yang diciptakan oleh massa kelas pekerja dan dengan membangun lembaga-lembaga serta mengembangkan budaya proletar. Dasar strategi ini tidak mengorganisir kelas buruh dan petani dalam melakukan serangan frontal pada negara, namun sebagai pondasi dari sebuah budaya baru atau suatu norma dan nilai baru dari masyarakat proletar.⁴⁷ Menurut Gramsci, revolusi merupakan proses memperluas hegemoni kelas proletar dengan membangun sebuah blok sejarah baru secara bertahap dan bukan merupakan sebuah penghancuran total yang berlansung sesaat yaitu ketika kekuasaan negara lepas dari suatu kelas ke

⁴⁶ Ibid., 172.

⁴⁷ Ibid., 173.

kelas lain.⁴⁸ Jadi, transisi menuju sosialisme terdiri dari dua proses berbeda yang saling berkaitan, yaitu tumbuhnya hegemoni kelas pekerja dan transformasi negara menuju bentuk negara sosialis.

Dari dua elemen diatas maka nantinya ketika kaum proletar mengambil alih kekuasaan negara, perang posisi Gramsci menjadi basis alamiah bagi negara baru, yang mana hal ini tidak akan dicapai apabila belum dibangun terlebih dahulu hegemoni kaum proletar.⁴⁹ Jadi pada prinsipnya, revolusi sosialis bukanlah semata-mata perampasan kekuasaan negara yang dramatis, yang kemudian diikuti dengan membangun sosialisme, namun ia adalah proses yang berawal di bawah kapitalisme.⁵⁰ Serangan perang posisi Gramsci adalah serangan berkelanjutan terhadap superstruktur kebudayaan bagi negara-negara yang telah maju secara industrial.⁵¹ Dengan demikian yang paling penting adalah bagaimana dengan berbasiskan pada praktik tentang konsep dialektis perubahan revolusioner, tidak lagi muncul pemisahan secara sewenang-wenang antara perjuangan defensif dan ofensif, dan tidak lagi membagi proses revolusioner ke dalam momen revolusioner dan bukan revolusioner.

⁴⁸ Simon, *Gagasan-gagasan*, 31.

⁴⁹ Patria dan Arief, *Antonio Gramsci*, 174.

⁵⁰ Simon, *Gagasan-gagasan*, 122.

⁵¹ Bellamy, *Teori Sosial Modern*, 201.

BAB III

Kronologi Sengketa Wacana Dalam Pemilihan Presiden 2019

B. Polemik Wacana Pra Pemilu 2019

Penyelenggaraan pemilihan presiden secara langsung sangat sulit untuk mencapai kata sempurna dan berlangsung damai tanpa adanya kegaduhan. Pasti ada saja hal-hal permasalahan terjadi yang dapat menghambat penyelenggaraan. Entah itu isu-isu yang dikembangkan oleh elit politik demi kepentingannya atau memang permasalahan itu datang dari ketidak sempurnaan setiap penyelenggaraan. Tentu apapun itu, harus segera diperbaiki agar penyelenggaraan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan bersama. Begitu pun hajatan besar seperti pemilu tidak dapat terhindarkan dari polemik maupun isu-isu negatif yang menyerang antar kandidat calon presiden, Lembaga penyelenggara, maupun pihak yang terkait dengan pemilu 2019 yang dimainkan oleh para politikus demi mencapai kepentingannya. Adapun beberapa polemik pra pemilu sebagaimana akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. 31 Juta Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Isu terkait 31 juta penduduk yang sudah memiliki hak pilih akan tetapi belum masuk daftar pemilihan tetap (DPT) pada awalnya diungkap oleh Viryan Aziz salah satu Komisioner KPU RI dalam acara peresmian Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) di Jakarta yang kala itu menyampaikan berdasarkan laporan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Beliau berkata, “Ada potensi 31 juta pemilih sudah melakukan perekaman KTP elektronik, tetapi belum ada di DPT.”¹ Mendengar perkataan Viryan Aziz tersebut, Zainuddin Amali selaku Ketua Komisi II DPR yang juga turut hadir pada acara tersebut mengaku kaget dengan besaran jumlah tersebut, beliau berkata, “Saya agak terkejut dengan angka 31 juta hasil temuan Dukcapil yang belum masuk dalam DPT.”

Polemik ini kemudia ditanggapi dengan serius oleh kubu Prabowo-Sandi dengan mengecek langsung ke kantor KPU pusat yang terletak di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu tanggal 17 Oktober. Kubu Prabowo-Sandi sangat keberatan dengan adanya temuan tersebut dimana dikarenakan Kemendagri memberikan data tersebut setelah pemutakhiran data DPT yang dilakukan oleh KPU, sehingga menurut mereka ini berujung kepada ketidakpastian hukum dan terkesan seperti adanya kesengajaan atau menurut bahasa mereka Kemendagri terkesan ‘menyelundupkan’ data belakangan.² Terkait polemik ini kemuadian kubu Prbowo-Sandi menggaungkan kembali mosi tidak percaya kepada KPU dimana sebelumnya kubu Prabowo-Sandi selalu menyuarakannya sebagai respon terkait isu negatif yang menyerang KPU sebagaimana anggapan mereka dalam pemilu kali ini KPU sudah tidak netral lagi.

Kemudian pada Senin 10 Desember, para sekretaris jenderal (sekjen) dari partai pengusung dan pendukung Prabowo-Sandi melakukan kunjungan kembali ke KPU dan Bawaslu untuk mempertanyakan kembali

¹ Isu 31 Juta DPT Siluman Membayangi Pemilu 2019 dalam <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20181211163648/> Diakses 29 Mei 2019.

² Ibid.,

tentang 31 juta data pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. Dalam pertemuan tersebut, mereka meminta untuk ikut dilibatkan dalam proses analisis data pemilih, dan meminta KPU untuk membuka nomor induk kependudukan (NIK). Dimana dengan harapan agar tidak ada yang ditutup-tutupi dalam DPT sehingga tidak ada kecurigaan. Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan berkata, “Duduk bersama untuk membuka mencermati data secara lengkap dan detil, serta mempunyai metode cara yang sama (dalam menganalisis) sehingga hasilnya pun sama.”³

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif dalam menanggapi hal ini menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak ada upaya untuk menyelundupkan data. Ia juga menegaskan tidak ada upaya penambahan jumlah penduduk dalam data. Bahkan terang beliau kini KPU sudah bisa mengakses data 31 juta penduduk yang menjadi polemik tersebut dengan memberikan password kepada KPU sebagai hak akses.⁴

2. Kotak Suara Berbahan Kardus

Tahap proses persiapan dalam pemilu tahun 2019 menemui sandungan. Empat bulan menjelang pemilu sudah ramai meragukan kredibilitas Komisi Penyelenggaraan Umum (KPU). Hal ini dikarenakan rencana KPU dalam pemilu kali ini menggunakan kotak suara berbahan kardus, di mana sebelumnya KPU selalu menggunakan kotak suara berbahan logam untuk melindungi surat suara. Kekhawatiran mulai menyeruak

³ Ibid.,

⁴ Ibid.,

meragukan daya tahan kotak suara yang berbahan kardus rancangan KPU tersebut dalam menjaga integritas hasil pemilu.

Ujang Komaruddin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, juga termasuk yang khawatir dengan penggunaan kotak suara berbahan kardus. Menurutnya kotak suara kardus berpotensi mudah jebol yang tentu akan melahirkan konflik politik di kemudian hari. Lebih lanjut beliau beranggapan bahwa kotak suara berbahan kardus tersebut setelah pemilihan tidak akan dipakai dan akan menjadi mubazir serta menghabiskan anggaran yang besar.⁵ Kotak suara berbahan kardus tidak menjamin dapat bertahan lama dan bisa digunakan untuk beberapa kali kesempatan pemilu, sehingga apabila memaksa setiap kali pemilu diharuskan mencetak kotak suara baru tentu hal ini tidak menciptakan efisiensi anggaran.

Sementara itu, kubu Prabowo-Sandi menolak kotak suara berbahan kardus. Dalam keterangan pers, melalui Chusni Mubarak selaku ketua DPP Gerindra memberikan pendapat bahwa penggunaan kotak suara berbahan kardus dapat mengurangi kredibilitas pelaksanaan pemilu dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu. Dimana menurut beliau pada saat ini marak terjadi pemilu berlangsung tidak adil dan apabila kotak suara berbahan kardus menurutnya siapapun bisa membuka kardus tanpa berbekas atau membuka kardus tersebut tanpa membuka gemboknya sehingga percuma kotak suara berbahan kardus tersebut diberi gembok.⁶

⁵ Polemik Kotak Suara Kardus di Pemilu 2019 Bagaimana Aturannya dalam <https://www.liputan-6.com/news/read/3817075> Diakses 01 Juni 2019.

⁶ Ibid.,

Di sisi lain kubu Jokowi-Amin tidak mempermasalahkan bahan kotak suara. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kotak suara berbahan kardus memang lebih rentan akan potensi kecurangan, namun kubu beliau telah menyiapkan langkah antisipasi dalam hal itu, yakni penguatan saksi di lapangan. Beliau berkata, “Dulu kami menolak yang sama. Tapi akhirnya kami melihat hal-hal tersebut -aspek biaya- . . . Yang penting saksi mengawasi di setiap TPS, itu bukti hukum. Sehingga dokumen C1 itu betul-betul dicermati bersama.”⁷ Beliau juga menuding bahwa kubu lawan selalu berbicara pemilu curang dimanapun seperti menurut kecurangan akan dijadikan alasan pihak lawan apabila nanti mereka kalah dalam pilpres.

Achamd Baidowi selaku Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP mengatakan bahwa kotak suara berbahan kardus dengan semangat efisiensi yang nantinya akan digunakan KPU di Pemilu 2019 sudah dibicarakan dan didiskusikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan bersama Komisi II DPR. Dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh semua fraksi di Komisi II DPR yang artinya semua unsur pimpinan yang mewakili kelompok koalisi pemerintah dan kelompok oposisi juga hadir dan turut serta saat pengambilan keputusan. Sehingga menurut beliau permainan isu politik dengan niat untuk melakukan kecurangan melalui desain kotak suara berbahan kardus harus dihilangkan, karena sudah melalui kesepakatan bersama.⁸

⁷ Ibid.,

⁸ Ibid.,

Di tengah polemik pro dan kontra perihal kotak suara berbahan kardus, KPU menjamin penggunaan kotak suara berbahan kardus tidak menurunkan derajat kualitas pemilu. Arief Budiman sebagai Ketua KPU menjamin keamanan kotak suara berbahan kardus. Beliau menegaskan bahwa karton kedap air yang nantinya digunakan dalam pemilu tidak sama dengan karton atau kardus dari bungkus mie instan maupun bungkus snack, akan tetapi karton yang akan digunakan nantinya lebih kuat yang dapat menahan bobot berat badan orang dewasa. Dan juga menurut beliau penggunaan kotak suara berbahan kardus sebenarnya sudah digunakan berkali-kali dalam pemilu sebelumnya dan selama penggunaan itu relatif tidak ada laporan kerusakan.⁹

Apabila ditinjau dari segi hukum dalam Undang-Undang “Pemilu nomor 7 tahun 2017 tidak dijelaskan secara rinci perihal “spesifikasi kotak suara.” Dalam penjelasan pasal 341 ayat 1 huruf a disitu disebutkan bahwa perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan, yang artinya bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar. Di sini UU Pemilu memberi kebebasan kepada KPU selaku penyelenggara pemilu dalam menentukan spesifikasi teknis, bentuk, maupun ukurannya. Kemudian penjelasan lebih teknis lagi yang dirancang dalam peraturan KPU ialah tertuang dalam peraturan nomor 15 tahun 2018 pada pasal 7 di mana dijelaskan, kotak suara terbuat dari karton kedap air yang pada satu sisinya bersifat transparan. Kotak suara dalam aturan itu harus merupakan

⁹ Ibid.,

perlengkapan sekali pakai. Sekalipun kotak suara berbahan kardus yang digagas KPU tidak menyalahi ketentuan Undang-Undang dan peraturan KPU, namun KPU memiliki tugas yang tidak gampang yaitu untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa kotak suara berbahan kardus gagasan KPU nantinya bisa tahan dari segala ancaman sehingga dengan begitu keraguan dalam benak masyarakat dapat teredam.

3. Surat Suara Tujuh Kontainer Tercoblos

Kabar soal tujuh container berisi surat suara tercoblos membuat masyarakat gaduh. Kabar yang menyebar lewat grup *WhatsApp* serta media sosial dalam bentuk rekaman suara yang tidak diketahui siapa pemiliknya telah membuat suhu politik semakin panas. Rekaman tersebut berbunyi sebagai berikut, “Ini sekarang ada 7 kontainer di Tanjung Priok, sekarang lagi geger. Marinir sudah turun, dibuka satu (kontainer) isinya kartu suara yang dicoblos nomor 01. Dicoblos Jokowi. Itu kemungkinan dari China itu.”¹⁰

Berita ini mulai viral dan mendapat tanggapan serius dari KPU, Bawaslu, Polisi dan lembaga yang terkait berawal dari cuitan Andi Arief melalui akun twitternya @AndiArief_ pada Rabu 2 Januari 2019, bunyi cuitannya sebagai berikut, “Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah di coblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya, karena ini kabar sudah beredar.”¹¹ Kemudian pada malam yang sama yakni pada rabu malam tanggal 2 Januari 2019 KPU bersama

¹⁰ Fakta dan Kronologis Hoax 7 Kontainer Surat Suara Dicolos dalam <https://nasional.tempo.co/read/1161417/5> Diakses 2 Juni 2019.

¹¹ Ibid.,

Bawaslu turun langsung mengecek kabar tersebut ke pelabuhan Tanjung Priok dan hasilnya kedua lembaga tersebut menyatakan bahwa berita tersebut adalah hoaxes.

Setelah mendapat kepastian bahwa kabar tersebut *hoax* maka setelah itu KPU dan Bawaslu melaporkan kasus tersebut ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk meminta segera mengusut secara tuntas kasus-kasus yang berkaitan dengan berita bohong atau *hoax* yang telah mengganggu ketenangan suasana menjelang hari pencoblosan. Begitu juga dengan reaksi para pendukung Jokowi-Ma'ruf yang ramai-ramai menyerang Andi Arief di media sosial karena telah ikut menyebarkan berita bohon. Sedangkan tindakan kubu Jokowi-Ma'ruf melalui Hasto Kristiyanto selaku sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, melaporkan Andi Arief dan pelaku pembuat rekaman suara yang belum diketahui pelakunya atas dugaan tindak pidana penyebaran berita palsu atau *hoax* ke Bareskrim Polri.

4. Wacana *People Power*

Embrio wacana gerakan *people power* dalam kontestasi Pilpres 2019 mulai dimunculkan oleh Politikus Senior Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Amien Rais pada saat aksi 313 tanggal 31 Maret. Aksi yang dihadiri oleh sejumlah ormas seperti Forum Umat Islam (FUI), Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni 212 sebagai pengingat kepada KPU agar mereka tidak berbuat curang dalam penyelenggaraan Pemilu 17 April 2019 nanti. Amien Rais menyampaikan dalam orasinya “Kalau sampai nanti terjadi kecurangan,

sifatnya terstruktur, sistematis dan massif, ada bukti, itu kita enggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi), enggak ada gunanya, tapi kita langsung *people power*.”¹² Dalam aksi tersebut istilah *people power* atau gerakan rakyat berhasil menjadi kata kunci yang menonjol dalam orasi Amien Rais dan memicu sorotan.

Menurut Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago, pernyataan Amien Rais dinilai telah melenceng dari konstitusi Indonesia. Perkataan beliau sebagaimana dilansir dalam Okezon.com, beliau mengajak agar tidak keluar dari Konstitusi, perihal Amien Rais yang tidak percaya kepada MK, itu urusan pribadi, namun beliau mengingatkan agar jangan membuat negara kita Indonesia ini dengan *chaos* dan menggunakan politik pecah belah¹³

Pendapat yang sama datang dari Emrus Sihombing Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan beranggapan bahwa kalimat yang dikatakan oleh Amien Rais tersebut bernada ancaman yang sifatnya negatif. Menurut Emrus, Amien Rais yang saat ini posisinya sebagai politikus senior seharusnya lebih paham dalam mengambil langkah apabila terdapat sengketa dalam pemilu. Ia berkata,

Artinya kalau pelanggaran ya proses saja sesuai undang-undang. Jadi bukan lakukan *people power*. Karena itu gerakan masyarakat secara massif. Biasanya *people power* dampak tidak baik. Oleh karena itu kalau ada kecurangan, sejatinya lakukan proses hukum diajukan di MK dan dikawal . . . Saya pikir saya sayangkan pernyataan sebagai tokoh reformasi yang bawa Indonesia ke reformasi yang konstitusional. Dia tokohnya, harusnya jangan katakana *people*

¹² Seruan *People Power* Amien Rais dan Kegagalan *People Power* dalam <https://tirto.id/> Diakses 3 Juni 2019.

¹³ Pernyataan Amien Rais Siapkan *People Power* Dinilai Melenceng dari Konstitusi dalam <https://news.okezone.com/read/2019/04/01/605/2037781/> Diakses 3 Juni 2019.

power. Tapi kalau ada kecurangan akan kita kawal proses hukum dan kita sajikan data-data dan kita kawal, itu baru pernyataan bagus.¹⁴

Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Aditya Perdana menyayangkan Amien Rais yang tidak mau menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Beliau berpendapat bahwa perkataan Amien Rais itu adalah *warning*, peringatan kepada pemerintah agar jangan sampai melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan pemilu. Menurut beliau sudah biasa pasti terdapat ketidak puasan dari pihak yang kalah dalam pemilu dan biasanya selalu menuduh kepada petahana atau pihak penyelenggara yang dianggap telah berpihak. Dan apabila para loyalis peserta pemilu melakukan *people power* tentu itu akan sangat berpotensi menjadi konflik. Menurut beliau apabila sengketa pemilu ketemu di jalanan atau diselesaikan di jalanan dengan mengerahkan massa untuk turun jalan maka potensi konfliknya besar dan dampaknya serius. Dan menurut beliau juga tidak baik apabila sampai berperang di jalanan hanya gara-gara hasil pemilunya dianggap tidak *legitimate* oleh pihak lain.¹⁵

Komentar cukup pedas datang dari Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsuddin Haris, beliau menilai bahwa Amien Rais tidak memiliki massa pendukung yang cukup dalam menggerakkan massa untuk melakukan *people power*. Beliau berpendapat bahwa puncak popularitas Amien Rais terjadi ketika pada saat itu maju sebagai calon presiden yang berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo, dan pada saat itu Amien Rais meraih posisi ke-4 dari

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ *People Power* Amien Rais Gertakan dari Orang Tak Terpakai dalam <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20190401105414-32-382494/> Diakse 3 Juni 2019.

lima capres. Dari situ beliau menarik kesimpulan bahwa Amien Rais tidak memiliki massa pendukung dalam mengerahkan massa untuk melakukan *people power*. Beliau juga menyayangkan pernyataan Amien Rais, namun menurut beliau pernyataan itu tidak punya dampak karena Amien Rais tidak memiliki massa. Bahkan bahasa beliau Amien Rais cuma suara orang yang tidak terpakai saja.¹⁶

Setelah pernyataan *people power* oleh Amien Rais menuai sorotan dari berbagai media dan komentar dari para tokoh. Pada saat hari pencoblosan, usai mencoblos Amien Rais memberikan pengertian dan maksud dari istilah *people power* yang ia katakan pada waktu lalu. Lebih lanjut menurut Amien Rais yang dimaksud *people power* yang akan digunakan apabila terjadi kecurangan dalam pemilu bukanlah untuk perang atau membuat bangsa berkelahi. Berikut perkataan Amien Rais, “*People power* bukan titik darah penghabisan. Perang, enggak juga. Ngawur.”¹⁷

C. Polemik Wacana Pasca Pemilu

Tentu polemik yang terjadi pasca pemilu lebih gaduh lagi. Suhu politik semakin panas dengan munculnya berita-berita yang belum jelas kebenarannya serta menyebarnya secara masif potongan video dalam berbagai macam bentuk kecurangan di berbagai media sosial telah membuat masyarakat heboh yang melahirkan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pemilu 2019 dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Amien Rais *People Power* Pemilu Bukan Perang Tapi Jeritan Rakyat dalam <https://nasional.tempo.co/read/1196502/> Diakses 3 Juni 2019.

penyelenggara pemilu yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan sosial unjuk rasa dengan membawa tuntutan-tuntutan yang diklaim sebagai solusi atas kerusakan yang telah terjadi. Berikut penulis rangkum berbagai unjuk rasa yang terjadi pasca pemilu.

1. Demo di Depan Kantor Bawaslu

Dengan banyaknya informasi-informasi kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2019 lalu, kemudian puluhan massa menggelar aksi protes yang bertajuk 'Aksi Lawan Pemilu Curang' yang di gelar di depan kantor Bawaslu di Jakarta pada hari Rabu 24 April 2019. Mereka menuntut dan mendesak agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Bawaslu menyatakan secara Nasional bahwa pemilu 2019 telah dipenuhi oleh tindakan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Dalam aksi tersebut massa aksi didominasi oleh kalangan ibu-ibu atau 'emak-emak' dimana mereka juga membawa poster dan spanduk yang bertulisan 'tolak pemilu curang'.

Koordinator aksi, Zumhur Hidayat, mengatakan bahwa kecurangan sudah terjadi mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, sampai pasca penyelenggaraan pemilu. Ia mengatakan bahwa saat ini bukan lagi persoalan Prabowo atau pun Jokowi, namun ini adalah persolan demokrasi yang telah dibajak oleh tirani negeri ini yang ingin menguasai Negara Indonesia. Ia

mengingatkan apabila ada yang berusaha bermain curang apalagi sampai mengatur untuk pemilu curang maka rakyat sendiri yang akan melawan.¹⁸

Kemudian dalam aksi tersebut orator aksi selalu meneriakkan protes, berikut penggalan kalimat dari pernyataan orator aksi,

Kami meminta Bawaslu agar menyatakan Pemilu 2019 banyak kecurangan . . . saluran yang baik adalah Bawaslu. Hanya satu di Indonesia. Satu-satunya lembaga yang kita percayai saat ini . . . Kita buktikan Bawaslu masuk dalam jaringan setan atau tidak . . . Kita meminta Bawaslu agar menyatakan bahwa pemilu ini curang!¹⁹

Juru kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang ikut dalam aksi tersebut, Ansufrri Idrus Sambo mengatakan bahwa dalam aksi tersebut bukan hanya sekedar aksi protes biasa, namun pihaknya telah menyiapkan dan membawa sejumlah bukti terkait kecurangan dalam pemilu. Dan beliau berharap nantinya ada perwakilan massa yang bisa memberikannya kepada komisioner Bawaslu.²⁰ Dalam aksi tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, beliau meminta agar pihak Bawaslu segera bergerak untuk menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut. Karena apabila pihak Bawaslu tidak segera bergerak, maka masyarakat sendiri yang akan mencari tindakan alternatif untuk merespon kecurangan dalam pemilu tersebut.

Lebih lanjut menurut Ferry Juliantono, seperti dilansir Tirto.id beliau mengklaim bahwa telah menemukan kecurangan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif seperti misalnya kecurangan yang terjadi di Boyolali

¹⁸ Pendukung Prabowo Demo di Bawaslu Minta Usut Kecurangan Pemilu dalam <https://tirto.id/> Diakses 3 Juni 2019.

¹⁹ Aksi Massa Desak Bawaslu Nyatakan Pemilu 2019 Curang dalam <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190424133039-20-389183/> Diakses 3 Juni 2019.

²⁰ Ibid.,

di Jawa Tengah dan Selangor di Malaysia dimana klaim beliau disitu ditemukan kecurangan berupa surat suara yang sudah dicoblos yang tentu melibatkan sejumlah orang suruhan. Kemudian kecurangan kuantitatif yakni dengan ditemukan banyak terjadi kesalahan dalam memasukkan data yang diinput tanpa C1 asli. Menurut beliau banyaknya kesalahan dalam memasukkan data tersebut bukan terjadi karena *human error* tapi *human order*.²¹

Sementara itu dalam menyikapi aksi tersebut pihak Bawaslu melalui Rahmat Bagja, salah satu Komisioner Bawaslu, beliau mengatakan bahwa pihaknya tidak ada satu pun yang menginginkan terjadinya kecurangan dalam pemilu. Dan menurut beliau Bawaslu juga tidak bisa menyatakan bahwa pemilu 2019 telah terjadi kecurangan dengan secara sepihak. Karena dalam menyatakan pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan massif harus diperkuat dengan adanya sejumlah bukti dan alat yang dijadikan bukti itu berupa apa, komponen-komponennya juga banyak dan harus melihat juga laporan-laporannya.²²

2. Demo di depan KPU oleh Mahasiswa dan Pemuda

Massa dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Agama Islam dan Komite Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) menggelar aksi di depan kantor KPU pada tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 10.30 WIB. Massa aksi yang didominasi oleh kalangan

²¹ Pendukung Prabowo Demo di Bawaslu Minta Usut Kecurangan Pemilu dalam <https://tirto.id/> Diakses 3 Juni 2019.

²² Ibid.,

mahasiswa dan pemuda tersebut terlihat membawa sejumlah poster dan spanduk bertuliskan “Save KPU, Hormati Keputusan KPU”.

Dalam aksi tersebut massa aksi menyerukan agar semua pihak menghormati keputusan KPU. Koordinator aksi Rifki Basit dalam orasinya mengajak semua pihak menghormati penetapan hasil pemilu tersebut.

Berikut kalimat dari penggalan orasinya,

Hasil pemilu yang diumumkan KPU memiliki legitimasi dan kekuatan hukum tetap karena dihasilkan dari proses demokrasi yang benar, jujur, adil dan transparan . . . Stop Provokasi dan ujaran kebencian yang bisa memecah belah bangsa. Saatnya kita semua kembali Bersatu pasca penetapan hasil pemilu 2019 dalam rajutan Bhinneka Tunggal Ika.²³

Begitu juga orasi dari koodinator aksi lainnya, Aminaullah juga menyatakan mendukung dan memberikan penghormatan penuh kepada KPU dan Bawaslu. Dalam orasinya ia mengatakan bahwa telah melihat KPU dan Bawaslu terus diintrik oleh para elit politik dengan membangun narasi bahwa KPU dan Bawaslu telah melakukan kecurangan dalam pemilu. Ia berpendapat bahwa selama ini KPU dan Bawaslu telah menjalankan proses-proses pemilu dengan adil dan bersih. Ia juga menyatakan percaya dengan kinerja KPU dan Bawaslu dan berharap kepada dua lembaga tersebut untuk menjaga kepercayaan itu sebaik mungkin.²⁴

²³ Sejumlah Massa Demo di Depan KPU Minta Hasil Pemilu Dihormati dalam <https://news.detik.com/berita/d-4558271/> Diakses 5 Juni 2019.

²⁴ Pendemo Mulai Berdatangan ke KPU Tapi Tolak *People Power* 22 Mei dalam <https://www.suara.com/news/2019/05/21/111005/> Diakses 5 Juni 2019.

3. Demonstrasi 22 Mei 2019 (*People Power*)

Rekapitulasi suara pemilihan presiden 2019 yang dilakukan KPU selesai lebih cepat dari target 22 Mei 2019. Setelah pleno yang berlangsung marathon hingga Selasa 21 Mei dini hari, KPU mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'ruf menang dengan meraih 55,5% suara sedangkan Prabowo-Sandi hanya mendapatkan 44,5% suara.

Sebelum pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 22 Mei, kubu Prabowo-Sandi gencar menggemakan bahwa terjadi kecurangan pada Pemilu dan memobilisasi kekuatan massa untuk melakukan unjuk rasa menolak hasil pilpres yang kemudian disebut sebagai *people power* yang sebelumnya sudah digaungkan jauh-jauh hari. Kubu Prabowo-Sandi sudah bersiap-siap menolak hasil pilpres, bahkan sebelum penghitungan selesai. Alasannya ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif.

Pada hari Selasa, 21 Mei sejumlah massa pendukung pasangan Prabowo-Sandi sudah mulai berdatangan membanjiri Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa di sekitar gedung Bawaslu RI yang kemudian berlanjut bersama-sama menuju kantor KPU untuk menolak hasil pilpres dan menuntut mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma'ruf karena telah melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif, dimana pada awalnya kubu Prabowo-Sandi menolak untuk naik banding ke Mahkamah Konstitusi.

Mantan Menteri Kehutanan M.S. Kaban yang ikut dalam aksi tersebut berorasi di hadapan massa dan mengajak peserta aksi membangun semangat

kejujuran dan keadilan dalam demokrasi, beliau berkata, “Kita ingin proses demokrasi yang dibangun negara ini adalah yang sudah diamanatkan oleh rakyat, yang sudah dituangkan dalam undang-undang . . . tapi kenapa menetapkan hasil yang salah maka presidennya hasil perhitungan yang salah.”²⁵

Aksi tersebut yang awalnya berlangsung damai, namun pada malam hari tepatnya Selasa malam, kedamaian tersebut berubah menjadi kerusuhan bahkan mematikan. Dimana kerusuhan tersebut sedikitnya 8 orang meninggal dunia dan ratusan orang mengalami luka-luka. Gas air mata, petasan, bom molotov, dan senjata lainnya saling dilemparkan dalam kerusuhan tersebut. Dalam aksi tersebut, kejadian kerusuhan pada Selasa malam sekitar pukul 22.45 WIB diduga massa yang melakukan provokasi kepada petugas dengan melemparkan batu, bom molotov, dan petasan besar adalah massa aksi yang baru datang dan di duga pula mereka adalah massa suruhan yang memang ditugaskan untuk melakukan kerusuhan. Kemudian polisi juga telah mengamankan sejumlah peserta yang diduga sebagai provokator dan menetapkan 11 tersangka untuk kasus kerusuhan dalam unjuk rasa tersebut.

Keesokan harinya, pada Rabu 22 Mei massa yang sebelumnya ratusan terus bertambah menjadi ribuan. Para pendukung semakin kuat berseru soal tuntutannya yaitu turunkan Jokowi. Orator aksi terus membakar semangat massa aksi dan sempat menyinggung korban kerusuhan yang terjadi pada

²⁵ Aksi 22 Mei adalah Jihad Konstitusi untuk Lawan Kecurangan Pemilu dalam <https://www.matamatapolitik.com/polling-news> Diakses 7 Juni 2019.

selasa malam, berikut orasinya, “Hari ini kematian saudara kita tidak akan sia-sia. Apapun resiko kita harus hadapi. Ingat saudara-saudara ini negeri yang diperjuangkan oleh umat Islam.”²⁶

Terkait korban jiwa diungkapkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional yaitu Amien Rais ketika berorasi di hadapan massa aksi pada pada keesokan harinya dalam menyambangi massa aksi, yaitu Rabu Sore,

Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun . . . Tujuh Mujahid kita telah dipanggil Allah. Ada 200 sahabat kita yang masih di rumah sakit. Kita doakan semoga husnul khatimah, diampuni dosanya, diberikan luas kuburnya, diberi imbalan hebat pada hari akhir. Peristiwa tadi malam sungguh telah merusak Demokrasi kita. Mudah-mudahan yang menembaki bukan orang resmi dari polri. Siapa pun mereka, kita akan kejar sampai ke ujung bumi. Siapa pn mereka itu. Kita ikuti saja takdir Allah itu, berjuang terus insyaAllah kita menang . . . Kita yakin dengan Allah Akbar, tidak ada yang kita takuti sama sekali. Jadi terus berjuang, tidak ada kekerasan, tidak merusak bangunan, tidak merusak rumput. Seperti aksi bela Islam yang indah itu.²⁷

Kemudian dua tokoh dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yaitu Fadli Zon dan Neno Warisman menyambangi massa aksi yang masih bertahan hingga Rabu pukul 20.00 WIB. Fadli Zon bersama Neno Warisman naik ke atas mobil komando dan memberikan orasi singkat. Berikut orasinya,

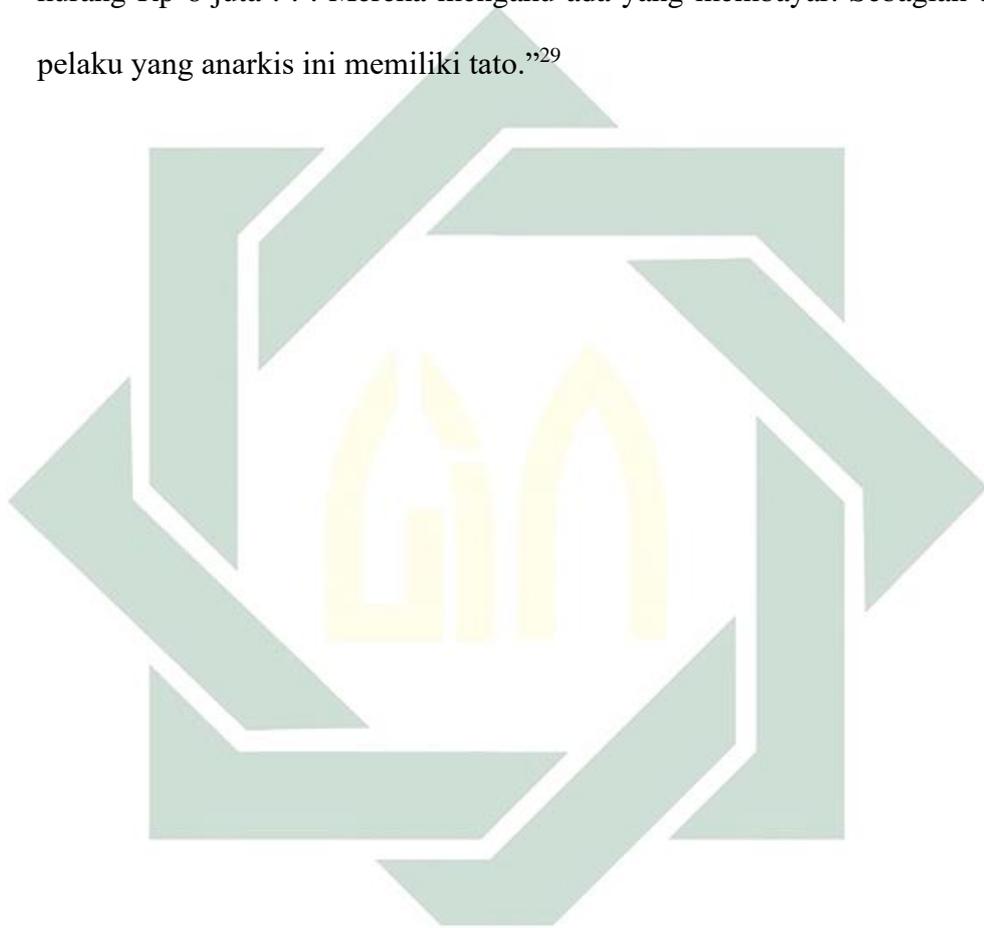
Saya yakin semua yang hadir di sini adalah orang-orang baik, rakyat yang baik, umat yang baik. Oleh karena itu sayay berpesan pada polisi, mereka adalah rakyat kita . . . Saudara-saudara yang datang dari Aceh sampai Papua saya yakin datang dengan keinginan sendiri tanpa ada yang bayar, betul?²⁸

²⁶ Aksi 22 Mei Massa di Depan Gedung Bawaslu Serukan Jokowi Turun dalam <https://amp.tirto.id/> Diakses 9 Juni 2019.

²⁷ Amien Rais Orasi Singkat di Depan Massa Aksi 22 Mei dalam <https://www.law-justice.co/artikel/65842/> Diakses 10 Juni 2019.

²⁸ Sambangi Massa Aksi 22 Mei di Depan Bawaslu RI Fadli Zon dan Neno Warisman Sempat Beri Orasi dalam <https://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/05/23/> Diakses 10 Juni 2019.

Menyinggung dari kerusuhan dalam demo 22 Mei tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan telah mengamankan sejumlah pelaku. Dari penangkapan itu, polisi menemukan uang sejumlah Rp 6 juta. Berikut pernyataannya, “Sebagian dibubarkan, sebagian diamankan, dari yang diamankan, ditemukan di mereka amplop berisi uang totalnya lebih kurang Rp 6 juta . . . Mereka mengaku ada yang membayar. Sebagian dari pelaku yang anarkis ini memiliki tato.”²⁹



²⁹ Polisi Tangkap 101 Orang Diduga Provokator dalam <https://www.liputan6.com/news/read/3973022/> Diakses 10 Juni 2019.

BAB IV
GERAKAN *PEOPLE POWER* PERSPEKTIF HEGEMONI
ANTONIO GRAMSCI

A. Pola Hegemoni Kultural Gramsci dalam Sengketa Pemilu

Hegemoni Gramsci ialah sebuah rantai kemenangan yang diperoleh melalui mekanisme konsensus. Dimana pada hakikatnya hegemoni adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan.¹ Konsep ini jika diterapkan dalam sengketa pilpres tahun 2019 kemarin ialah sebagaimana kubu pasangan calon presiden Prabowo-Sandi yang melakukan upaya untuk menggiring masyarakat agar menilai bahwa pemilu presiden kemarin akan berjalan dengan penuh kecurangan. Upaya-upaya itu nampak jelas sekali ketika kita melihat isu-isu yang berkembang pada saat pra pemilu. Kubu Prabowo selalu menyuarakan bahwa KPU sudah tidak netral lagi. Dan tidak sedikit kubu Prabowo menyerang KPU dengan isu negatif. Hal ini dilakukan karena ada upaya untuk menggiring masyarakat agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan oleh kubu pasangan calon presiden Prabowo-Sandi.

Bisa kita lihat dari isu-isu besar yang menjadi polemik dalam pemilu presiden kemarin. Mulai dari isu 31 Juta Daftar Pemilih Tetap (DPT). Melihat reaksi kubu Prabowo-Sandi dalam menanggapi isu ini, terlihat bahwa

¹ Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonia Gramsci, Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 120-121.

mereka menyudutkan KPU dan menuding bahwa Kemendagri 'menyelundupkan' data. Kubu Prabowo-Sandi menganggap kejadian ini dilakukan dengan kesengajaan. Dari kejadian tersebut kubu Prabowo-Sandi menyuarakan mosi tidak percaya kepada KPU. Tindakan ini dalam teori hegemoni Gramsci dapat dikatakan dalam proses membentuk suatu kesadaran dan persetujuan spontan dari masyarakat.² Disini dapat dilihat bahwa sikap dan tuduhan kubu Prabowo tersebut dapat dikatakan berlebihan dan cenderung memiliki muatan makna terselubung dibalik sikap yang mereka tunjukkan, melihat masalah ini masih bisa dicari jalan keluarnya. Dimana pada saat itu sebagai jalan keluar pihak KPU sudah diberikan password untuk dapat mengakses data penduduk yang belum terdaftar agar dapat didaftarkan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

Kemudian dalam polemik kotak suara berbahan kardus. Dapat kita saksikan bersama bahwa sikap dari kubu Prabowo-Sandi memilih berseberangan dengan konsep KPU dan lagi-lagi menjadikan momen ini sebagai propaganda untuk menguasai opini publik. Alasan dari kubu Prabowo menolak gagasan KPU terkait kotak suara kardus dapat diterima bahwa penggunaan kotak suara berbahan kardus dapat mengurangi kredibilitas dalam pelaksanaan pemilu. Dalam segala kemungkinan, kotak suara berbahan kardus yang sekalipun bagian penutupnya digembok tentunya kotak suara tersebut dapat dibuka dengan mudah sekalipun tanpa membuka gemboknya.

² Ernesto Laclau dan Chanral Mouffe, *Hegemoni dan Strategi Sosialis; Post Maxisme dan Gerakan Sosial Baru*, terj. Eko Prasetyo Darmawan (Yogyakarta: Resist Book, 2008), 97.

Namun disisi lain, penolakan kubu Prabowo tersebut tidak menghormati hasil kesepakatan bersama dalam hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah diselenggarakan bersama Komisi II DPR. Sebagaimana pernyataan dari salah satu anggota Komisi II DPR dari fraksi partai PPP yakni Achmad Baidowi bahwa, “RDP antara Komisi II DPR, pemerintah, KPU dan Bawaslu memutuskan penggunaan karton kedap suara dengan semangat efisiensi, semua fraksi di Komisi II DPR menyetujui hasil RDP tersebut.”³ Dari pernyataan ini dapat kita pahami bahwa penggunaan kotak suara berbahan kardus bukan keputusan sepihak dari KPU selaku penyelenggara pemilu. Namun gagasan kotak suara berbahan kardus ini sudah dibicarakan dan di bahas bersama anggota Komisi II DPR dalam RDP. Dimana dalam rapat tersebut telah dihadiri oleh semua fraksi yang ada di Komisi II DPR yang artinya anggota DPR dari fraksi partai pendukung Prabowo juga hadir dalam rapat tersebut dan juga menyetujui tentang penggunaan kotak suara berbahan kardus gagasan KPU. Dari sini maka perlu dipertanyakan apabila jika memang dari awal kubu Prabowo-Sandi menolak gagasan kotak suara berbahan kardus mengapa penolakan itu tidak dilayangkan pada saat rapat RDP berlangsung. Mengapa penolakan kotak suara berbahan kardus dilayangkan setelah adanya kesepakatan RDP dan dilontarkannya penolakan tersebut di ruang publik. Hal ini dapat kita duga bahwa kubu Prabowo-Sandi telah melakukan isu politik untuk menyudutkan KPU. dan ini juga dapat dikatakan membentuk suatu kesadaran dan

³ Polemik Kotak Suara Kardus di Pemilu 2019 Bagaimana Aturannya dalam <https://www.liputan-6.com/news/read/3817075> Diakses 01 Juni 2019.

persetujuan spontan dari masyarakat. Kubu Prabowo memanipulasi kesadaran sosial masyarakat untuk membangun persetujuan masyarakat bahwa KPU telah berencana melakukan kecurangan dalam pemilu tahun 2019 untuk kemudian terjadinya konsensus dalam masyarakat sebagai jalan masuk kepada hegemoni.⁴

Berlanjut kepada isu besar negatif lainnya yang menyudutkan KPU maupun petahana yakni pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf. Seperti misalnya isu negatif tentang kabar surat suara yang sudah tercoblos sebanyak tujuh kontainer yang berada di pelabuhan Tanjung Priok. Kabar tersebut menjadi kendaraan bagi pendukung fanatik dan elite politik dari kubu Prabowo-Sandi untuk mengambil simpati masyarakat dan meraih dukungan bagi masyarakat yang belum menentukan pilihannya maupun pemilih yang belum mantap terhadap pilihannya dikarenakan isu ini muncul sekitar satu bulan sebelum hari pencoblosan. Tentu adanya isu negatif tersebut kemudian diviralkan oleh pendukung dan elite politik yang mendukung Prabowo-Sandi tanpa ditelusuri kebenarannya terlebih dahulu seperti misalnya politikus dari partai Demokrat Andi Arief yang juga ikut menyebarkan berita tersebut melalui media twitter pribadinya. Dimana setelah ditelusuri berita tersebut diketahui hoax atau bohong.⁵

Isu-isu negatif tersebut sengaja ditumpangi oleh kubu Prabowo-Sandi untuk meneguhkan dominasinya kepada masyarakat. Disini kubu Prabowo-

⁴ Antonio Gramsci, *Prison Notebooks; Catatan-catatan dari Penjara*, terj. Teguh Wahyu Utomo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 63.

⁵ Fakta dan Kronologis Hoax 7 Kontainer Surat Suara Dicolos dalam <https://nasional.tempo.co/read/1161417/5> Diakses 2 Juni 2019.

Sandi menempatkan posisinya sebagai pemimpinan intelektual dan moral yang akan membentuk suatu kesadaran dan persetujuan spontan masyarakat yang selanjutnya akan membentuk suatu kehendak yang bersifat kolektif melalui ideologi yang menjadi pengikat.⁶ Tuduhan-tuduhan kecurangan yang diartikulasikan secara berulang-ulang akan membentuk kebenaran dalam pikiran manusia. Menurut Krishna Anand, pengulangan adalah metode hypnosis. Apa yang diulangi secara terus-menerus itu terukir pada diri seseorang dan menyebabkan ilusi pada hidup.⁷ Kemudian ketika sudah masuk ke dalam alam bawah sadar masyarakat maka terciptalah konsensus dalam masyarakat, atau kesepakatan spontan dari masyarakat atas manipulasi realitas yang disuguhkan.⁸

Politik memang tidak bisa kita pahami secara parsial, karena politik adalah kontestasi dari berbagai macam kepentingan untuk mencapai kekuasaan. Sedangkan sifatnya dinamis dan selalu berkembang sesuai dengan keadaan maupun kebutuhan dari para politikus sendiri dalam merengkuh kekuasaan. Menurut Deliar Noer, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan.⁹ Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa tujuan dari politik adalah kekuasaan sehingga tidak dapat kita salahkan apabila para politikus dalam meraih kekuasaan melakukannya dengan berbagai cara. Disini penulis ingin

⁶ Laclau dan Mouffe, *Hegemoni dan Strategi*, 97.

⁷ Krishna Anand, *Neo Spiritual Hypnotherapy, Seni Pemusatan Diri Untuk Bebas Dari Pengaruh Hipnotis Massal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 32.

⁸ Patria dan Arief, *Antonio Gramsci*, 125.

⁹ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik* (Jakarta: Rajawali, 1983), 6.

mengatakan bahwa kita selaku masyarakat bawah tidak perlu fanatik buta dan membela mati-matian terhadap politikus yang sedang berkontestasi untuk meraih kekuasaan. Karena sebenarnya kita hanya dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuannya.

Pemilu curang yang telah menjadi wacana, dimana menurut Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe wacana sendiri ialah memiliki pengertian seperangkat pemahaman yang luas dan maknanya berbeda-beda bahkan berbeda dengan realitas sebagai objek. Namun makna wacana akan menjadi sempit ketika ia menjadi objek material yang diartikulasikan secara parsial oleh dunia sosial.¹⁰ Adanya wacana kecurangan dalam pemilihan presiden tentu tidak bisa kita pahami secara parsial. Pilpres dalam pemilu merupakan pesta rakyat sekaligus politik. Dalam hal ini, ada tuntutan menyadari bahwa setiap pemilu bukan hanya penentuan pemimpin terpilih oleh rakyat, tapi praktik politik yang mewarnai jalannya pemilu. Oleh karena itu, wacana pilpres saat pemilu mengandung realitas sosial yang sangat luas. Ia bukan hanya sebagai realitas objek melainkan realitas makna objek. Objek sebagai realitas mudah dipahami oleh mata, namun makna objek sebagai realitas membutuhkan pemahaman luas yang melampaui objek materialis.

Pemilu adalah pesta rakyat yang berbalut politik dan di dalamnya terdapat berbagai macam permainan untuk memperkuat posisi kekuasaan mereka. Dalam lembaga pemerintahan selalu ada kekuasaan atau orang-orang yang berkuasa. Posisi orang-orang seperti itu selalu ada dan perannya selalu

¹⁰ Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, "Post-Marxist Without Apologies" dalam *New Left Review* No. 166, November-Desember 1987, 82.

tak menentu, sehingga makna di balik politiknya tak mudah dipahami rakyat. Dalam hal ini proses politik saat pemilu tidak bisa dipahami secara parsial. Polemik pilpres dalam pemilu tahun 2019 kemarin dengan beredarnya berbagai bentuk kecurangan di berbagai media sosial berupa potongan video ataupun narasi-narasi kecurangan yang tersebar di berbagai media sosial juga tidak bisa kita pahami secara parsial. Menemukan makna dibalik kejadian tersebut tidak mudah dipahami, sebab diantara dua kontestan juga melakukan permainan dan strategi untuk meraih kekuasaannya. Membela mati-matian dan mengikuti secara buta terhadap salah satu pasangan calon presiden sama saja kita mengajukan diri untuk menjadi alat dalam permainan politiknya.

Realitas kecurangan yang kita lihat akan sama di mata masyarakat, namun memiliki makna yang berbeda. Hanya saja makna-makna itu menjadi sama ketika diterjemah secara realitas sosial yang parsial. Makna-makna konstitutif dalam politik memiliki watak historis yang memiliki peran penting menjalankan negara. Pemilu curang menjadi objek yang sama secara material di mata rakyat, tapi tak mudah mengungkap makna-makna terselubungnya kecuali makna itu ditangkap secara parsial. Karena kecurangan bukan hanya objek pelanggaran aturan untuk meraih untung, melainkan juga bisa sebaliknya sebagai wacana serangan dalam menjatuhkan lawan.

Kemudian adanya suatu kelompok masyarakat yang melakukan gerakan *people power* demi memperjuangkan proses pemilu yang bersih total dari praktik kecurangan ialah sebenarnya mereka yang telah terhegemoni oleh kubu pasangan calon presiden Prabowo-Sandi. Kubu Prabowo-Sandi yang

disini menurut teori hegemoni Gramsci berposisi sebagai Intelektual organik telah berhasil menjadi organiser hegemoni dengan menciptakan konsensus di tengah-tengah masyarakat bahwa terjadi kecurangan dalam pemilu. sehingga masyarakat dapat digiring sesuai kerangka yang ditentukan oleh kubu Prabowo-Sandi. Kelompok masyarakat yang terhegemoni tersebut akan mematuhi apapun yang ditentukan oleh organizer hegemoni, karena apa yang dilakukan oleh mereka telah diyakini dengan benar dan tindakan mereka bagian dari memperjuangkan kebenaran.

Gambaran inilah yang menurut Bourdieu disebut sebagai doksa. Dimana dalam pengertiannya doksa ialah kepercayaan dan nilai-nilai tak sadar, berakar mendalam, mendasar, yang dipelajari, yang dianggap sebagai universal-universal yang terbukti dengan sendirinya, yang menginformasikan tindakan-tindakan dan pikiran-pikiran seorang agen dalam arena (*field*) tertentu. Doksa cenderung mendukung pengaturan sosial tertentu pada arena tersebut, dan dengan demikian mengistimewakan pihak yang dominan dan menganggap posisi dominan tersebut sebagai terbukti dengan sendirinya dan lebih disukai secara universal.¹¹

Disini kelompok masyarakat yang terhegemoni mempercayai kubu Prabowo-Sandi sepenuhnya tanpa keraguan. Bahkan kepercayaan mereka disertai dengan nilai-nilai tak sadar, yang artinya mereka mempercayai tanpa lagi berpikir kritis dan secara sukarela tanpa membangkitkan kesadaran

¹¹ Dwizatmiko, "Kuasa Simbolik Menurut Pierre Bourdieu: Telaah Filosofis" (Skripsi--Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2010), 40.

mereka. Karena menganggap bahwa apa yang dikatakan kubu Prabowo-Sandi merupakan kebenaran yang nantinya akan terbukti dengan sendirinya.

B. Jenis Hegemoni pada Gerakan *People Power* dalam Pilpres 2019

People power yang terjadi dalam pilpres kemarin dalam teori Gramsci tergolong dalam tipe hegemoni yang merosot (*decadent*). Dimana dalam gerakan *people power* kemarin telah mencapai kebutuhan atau mencapai sasaran, namun mentalitas massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan apa yang menjadi pemikiran dominan dari subjek hegemoni. Terbukti bahwa gerakan ini masih terdapat banyak penolakan dari kalangan masyarakat terutama dari ormas terbesar yang ada di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dan juga bisa kita lihat dari golongan massa yang hadir dalam gerakan tersebut adalah dari golongan ormas tertentu. Dan tidak mencakup semua golongan dari lapisan masyarakat.

Sekalipun organiser hegemoni telah melakukan berbagai macam cara untuk memengaruhi masyarakat, namun yang terjadi hanya golongan tertentu saja seperti misalnya kelompok Front Pembela Islam (FPI), para anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dimana bisa kita lihat sekelompok orang ketika mengikuti gerakan aksi tersebut banyak sekali yang membawa bendera HTI dan maupun simpatisan lainnya yang memiliki kepentingan tersendiri dalam mengikuti agenda *people power*. Itu artinya bahwa agenda *people power* yang diserukan organiser hegemoni tidak mampu merasuki pemikiran masyarakat dominan, sehingga hegemoni ini masuk dalam tipe hegemoni yang merosot menurut teori Gramsci.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian adanya gerakan *people power* dalam pemilihan presiden pada tahun 2019 melalui pendekatan hegemoni Antonio Gramsci maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Pola hegemoni yang dilakukan kubu Prabowo-Sandi terhadap masyarakat ialah bentuk persetujuan, dan kepemimpinan intelektual dan moral. Pertama, hegemoni dalam bentuk persetujuan dilakukan dengan menyebarkan propaganda di sosial media sehingga dapat berhasil menciptakan konsensus dalam masyarakat dan persetujuan secara sukarela. Kedua, hegemoni dalam bentuk hegemoni kepemimpinan intelektual dan moral ialah sebagaimana Nampak jelas disini bahwa kubu Prabowo-Sandi memperlihatkan intelektualnya dengan baik sebagai organizer hegemoni.
2. Berdasarkan analisis hegemoni Gramsci, gerakan *people power* yang terjadi dalam pilpres kemarin dalam teori Gramsci tergolong dalam tipe hegemoni yang merosot (*decadent*). Dimana dalam gerakan *people power* kemarin telah mencapai kebutuhan atau mencapai sasaran, namun mentalitas massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan apa yang menjadi pemikiran dominan dari subjek hegemoni. Hal ini ditandai dengan banyaknya penolakan yang di sampaikan dari berbagai lapisan

masyarakat, dan yang mengikuti gerakan tersebut hanya diikuti oleh golongan tertentu saja dan tentu golongan tersebut hanya bagian kecil daripada persentase rakyat Indonesia. Dimana artinya bahwa agenda *people power* yang diserukan organiser hegemoni tidak mampu merasuki pemikiran masyarakat dominan

B. Saran

Berdasarkan sudut pandang hegemoni Antonio Gramsci gerakan aksi *people power* adalah praktik politik atau strategi kubu oposisi untuk merengkuh kekuasaan. Sebagaimana dapat kita pahami bahwa pemilu adalah pesta rakyat yang berbalut politik dan di dalamnya terdapat berbagai macam permainan untuk memperkuat posisi kekuasaan. Untuk itu, kita selaku masyarakat bawah tidak perlu fanatik buta dan membela mati-matian terhadap politikus yang sedang berkontestasi untuk meraih kekuasaan. Karena sebenarnya kita hanya dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Skripsi:

- Anand, Krishna. *Neo Spiritual Hypnotherapy, Seni Pemusatan Diri Untuk Bebas Dari Pengaruh Hipnotis Massal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Barker, Chris. *Cultural Studies, Teori dan Praktik*, terj. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009.
- Barry, Peter. *Beginning Theory, Pengantar Komprehensif Teori Sastra dan Budaya*, terj. Harviah Widiawati dan Evi Setyarini. Yogyakarta: Jalasutra, 2010.
- Budiman, Arief. *Teori Negara. Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Bellamy, Richard. *Teori Sosial Modern: Perspektif Itali*, terj. Vedi R. Hadiz. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Bocock, Robert. *Pengantar Komprehensif untuk Memahami Hegemoni*, terj. Ikramullah Mahyudin. Yogyakarta: Jalasutra, 2015.
- Faruk. *Pengantar Sosiologi Sastra: dari Strukturalisme Genetik sampai Post-modernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fromm, Erich. *Revolusi Harapan; Menuju Masyarakat Teknologis yang Manusiawi*, terj. Kamdani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Gramsci, Antonio. *Prison Notebooks; Catatan-catatan dari Penjara*, terj. Teguh Wahyu Utomo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hendarto, Heru. *Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci; dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Iyubenu, Edi AH. *Berhala-Berhala Wacana*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.
- Jones, Steve. *Antonio Gramsci*. London: Routledge, 2006.
- Kurniawan, Heru. *Teori, Metode, dan Aplikasi Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe. *Hegemoni dan Strategi Sosialis; Post Maxisme dan Gerakan Sosial Baru*, terj. Eko Prasetyo Darmawan. Yogyakarta: Resist Book, 2008.
- Noer, Deliar. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Patria, Nezar dan Andi Arief, *Antonia Gramsci, Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

- Ratna, Nyoman Kutha. *Teori Metode dan Teknik: Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Saraswati, Ekarini. *Sosiologi Sastra: Sebuah pemahaman Awal*. Malang: Bayu Media, 2003.
- Simon, Roger. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: INSIST, 2004.
- Sugino, Muhadi. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Wiyatmi, *Sosiologi Sastra: Teori dan Kajian Terhadap Sastra Indonesia*. Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013.
- Arya Fernandes. "Politik Identitas dalam Pemilu: Proyeksi dan Efektifitas". *Jurnal Centre For Strategic and Internasional Studies*. No 1. Jakarta, 3-9, April 2019.
- Agus Saputro. "Agama dan Negara: Politik Identitas Menuju Pilpres 2019". *Jurnal Asketik*. Vol. 2 No. 2. Kediri, 111-119, 2019.
- Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, "Post-Marxist Without Apologies" dalam *New Left Review*. No. 166. 1987.
- Hasrul Hanif. "Antagonisme Sosial, Diskonsensus, dan Rantai Ekuivalensi: Menegaskan Kembali Urgensi Model Demokratik Agonistik". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 11 No. 1. Yogyakarta, 119-136, 2007.
- Khoiril Huda dan Zulfa 'Azza Fadhlika. "Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa". *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Vol. 4 No. 3. Semarang, 547-562, 2018.
- Mark R. Thomson. "Presidentas and People Power in Comparative Asian Perspective". *Phillippine Political Science Journal*. Vol. 28. 1-27, 2007.
- Moh. Hefni, "Runtuhnya Hegemoni Negara dalam Menentukan Kurikulum Pesantren", *Jurnal Karsa*, Vol. 19, No. 1, Pamekasan, 62-72, 2011.
- Putri, F. I. "Dominasi Negara Terhadap Warga Banten dalam Novel Kelomang Qizink Aziva (Kajian Hegemoni Gramsci)", *BAPALA*, Vol. 5, No. 1 Surabaya, 1-10, 2018
- R. Siti Zuhro. "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019". *Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 16 No. 1. Jakarta, 69-81, 2019.
- Rendra Alif Utama, "Hegemoni dalam Tokoh Raib dalam Novel Bumi Karya Tere Liye (Kajian Hegemoni Gramsci)", *BAPALA*, Vol. 4, No. 2, Surabaya, 1-6, 2017.

Dwizatmiko, “Kuasa Simbolik Menurut Pierre Bourdieu: Telaah Filosofis” Skripsi tidak diterbitkan (Jakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2010).

Manan, Putri Rezki. “Pengaruh *People Power* dalam Sukseksi Kepemimpina di Mesir”, Skripsi tidak diterbitkan (Makassar: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2017).

Setiawan, Wiji. “Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Antara Indonesia dan Filipina”, Skripsi tidak diterbitkan (Malang: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2017).

Internet dan Digital:

“Amien Rais *People Power* Pemilu Bukan Perang Tapi Jeritan Rakyat”, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1196502/> Diakses 3/6/2019.

“Amien Rais Orasi Singkat di Depan Massa Aksi 22 Mei”, dalam <https://www.law-justice.co/artikel/65842/> Diakses 10/6/2019.

“Aksi Massa Desak Bawaslu Nyatakan Pemilu 2019 Curang”, dalam <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190424133039-20-389183/> Diakses 3/6/2019.

“Aksi 22 Mei Massa di Depan Gedung Bawaslu Serukan Jokowi Turun”, dalam <https://amp.tirto.id/> Diakses 9/6/2019.

“Fakta dan Kronologis Hoax 7 Kontainer Surat Suara Dicolos”, dalam <https://nasional.tempo.co/re-ad/1161417/5> Diakses 2/6/2019.

“Gerakan *People Power* Siasat Terakhir Prabowo Jelang 22 Mei”, dalam <http://katadata.co.id/berita/2019/05/13/> Diakses 17/5/2019.

“Isu 31 Juta DPT Siluman Membayangi Pemilu 2019”, dalam <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20181211163648/> Diakses 29/5/2019.

“Pernyataan Amien Rais Siapkan *People Power* Dinilai Melenceng dari Konstitusi”, dalam <https://news.okezone.com/read/2019/04/01/605/20-37781/> Diakses 3/6/2019.

“Pendukung Prabowo Demo di Bawaslu Minta Usut Kecurangan Pemilu”, dalam <https://tirto.id/> Diakses 3/6/2019.

- “*People Power* Amien Rais Gertakan dari Orang Tak Terpakai”, dalam <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20190401105414-32-382494/> Diakse 3/6/2019.
- “Prabowo Sebut Quick Count Bohong Lembaga Survey Angkat Bicara”, dalam <https://www.Nasional.tempo.co/amp/1197486/> Diakses 17/5/2019.
- “Polisi Tangkap 101 Orang Diduga Provokator”, dalam <http://www.liputan6.com/news/read/39730-22/> Diakses 27/5/2019.
- “Polemik Kotak Suara Kardus di Pemilu 2019 Bagaimana Aturannya”, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/3817075> Diakses 01/6/2019.
- “Ramai-Ramai Kompak Tolak *People Power* di Penjuru Negeri”, dalam <https://m.detik.com/news/berita/d4551419/> Diakses 17/5/2019.
- “Sambang Massa Aksi 22 Mei di Depan Bawaslu RI Fadli Zon dan Neno Warisman Sempat Beri Orasi”, dalam <https://www.tribunnews.com/pil-pres2019/2019/05/23/> Diakses 10/6/2019.
- “Sejumlah Massa Demo di Depan KPU Minta Hasil Pemilu Dihormati”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4558271/> Diakses 5/6/2019.
- “Seruan *People Power* Amien Rais dan Kegagalan *People Power*”, dalam <https://tirto.id/> Diakses 3/6/2019.
- “6 Tewas di Rusuh Jakarta 22 Mei Dini Hari Tadi 200-an Orang Luka-Luka”, dalam <https://news.detik.com/berita/d4559846/> Diakses 27/5/2019.